

**PERENCANAAN WILAYAH SEKTOR PERIKANAN
DALAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN TRENGGALEK PROPINSI JAWA TIMUR**

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana

Oleh :

LUBNA MAGHFIROH

NIM. 0410840035



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
MALANG
2009**

PERENCANAAN WILAYAH SEKTOR PERIKANAN
DALAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN TRENGGALEK PROPINSI JAWA TIMUR

Oleh :

LUBNA MAGHFIROH

NIM. 0410840035

telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 06 Januari 2009
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Dosen Penguji I

Dosen Pembimbing I

Dr. Ir. NUDDIN HARAHAH, MP

Tanggal :

Dr. Ir. AGUS TJAHJONO, MS

Tanggal :

Dosen Penguji II

Dr. Ir. PUDJI PURWANTI, MP

Tanggal :

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Ir. MAHENO SRI WIDODO, MS

Tanggal :

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam SKRIPSI yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya / pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan SKRIPSI ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, Januari 2009
Mahasiswa

LUBNA MAGHFIROH
NIM. 0410840035



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul **"Perencanaan Wilayah Sektor Perikanan Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur"**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Dalam penulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini, yaitu:

1. Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS dan Erlinda Indrayani, SPI. MSi selaku dosen Pembimbing yang memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan usulan dan laporan penelitian.
2. Kepala dan seluruh pegawai Dinas kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Trenggalek atas kerjasama dan kesediaannya menerima peneliti untuk melakukan penelitian.
3. Seluruh keluarga, Bapak, Ibu, Kedua adikku, serta calon suamiku. Terimakasih atas doa dan semangat yang telah diberikan.
4. Seluruh pihak yang turut membantu dan berperan dalam penyelesaian penulisan laporan.

Penulis berharap, semoga laporan ini bermanfaat dan memberikan informasi bagi semua pihak yang berminat dan memerlukan.

Malang, Januari 2009

Penulis

RINGKASAN

Lubna Maghfiroh. Perencanaan Wilayah Sekor Perikanan Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur. (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS** dan **Erlinda Indrayani SPI, MSi**)

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dimana wilayahnya terdiri dari sekitar 18.000 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, sehingga merupakan wilayah yang sangat produktif salah satunya pada Kabupaten Trenggalek. Potensi sumberdaya laut di Kabupaten Trenggalek cukup besar. Panjang pantai di Kabupaten Trenggalek adalah 96 km yang meliputi 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Watulimo, Munjungan dan Panggul. Kabupaten Trenggalek memiliki wilayah laut yang cukup potensial. Menurut Hartoto (1999) di dalam Hardjamulya, dkk (2001) menyatakan bahwa secara implisit peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang relatif lebih luas pada pemerintahan tingkat lokal (kabupaten dan kota) agar mampu melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum dalam lingkup wilayahnya masing-masing. Dengan demikian pemerintah daerah akan mempunyai peluang untuk mendapatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumberdaya alam tersebut dan dapat memanfaatkan guna pembangunan ekonomi di wilayahnya. Pendapatan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan otda, yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah terdapat tuntutan untuk meningkatkan penerimaan PAD. Agar diupayakan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah (Adisasmita, 2006).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1)Basis atau tidaknya sektor perikanan terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. 2) Perencanaan wilayah sektor perikanan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Trenggalek. 3)Alternatif kebijakan atau solusi yang dapat diterapkan berkaitan dengan sumberdaya perikanan dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi Pemerintah, Mahasiswa, Masyarakat dan Peneliti.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian tipe penjelasan (*Explanatory* atau *Confirmatory Research*). Dengan metode survei. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Bentuk analisisnya meliputi analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis linear programming dengan POM for windows.

Dari hasil analisis *Location Quotient* diperoleh nilai LQ pada tahun 2001 sebesar 6.02, tahun 2002 sebesar 8.67, tahun 2003 sebesar 7.95, tahun 2004 sebesar 10.56, tahun 2005 sebesar 7.61, tahun 2006 sebesar 6.99, tahun 2007 sebesar 5.22. Mulai tahun 2001 sampai dengan 2007 diperoleh nilai LQ > 1, maka sektor perikanan Kabupaten Trenggalek merupakan sektor basis di dalam kegiatan ekonomi di Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program POM for windows diperoleh pendapatan optimal sebesar Rp 95.584,03 juta. Pendapatan ini diperoleh apabila penangkapan ikan di laut dapat dilakukan pada daerah seluas 408,9151 km² per tahun daerah penangkapan. Budidaya dilakukan pada lahan seluas 126,9682 ha per tahun. Pengolahan hasil perikanan dapat menghasilkan sebanyak 18.329,3 ton per tahun. Sedangkan penangkapan ikan di perairan umum tidak perlu dilakukan.

Faktor-faktor penyebab masih rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PAD di Kabupaten Trenggalek disebabkan antara lain :

- Keberadaan retribusi seringkali membuat masyarakat enggan untuk memenuhi kewajibannya. Karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya retribusi. Selain itu tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar retribusi.
- Keterbatasan pemilik modal, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan terbatasnya SDM nelayan mengakibatkan potensi sumberdaya perikanan laut dalam (lepas Pantai) dan perikanan tambak belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Belum adanya petugas penyuluh/ tenaga fungsional pada masing-masing kecamatan, menyebabkan kurang optimalnya pembinaan terhadap masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
- Masih tingginya *fish losses* di TPI Prigi menyebabkan data produksi penangkapan ikan kurang faktual dan perolehan PAD dari retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan belum seimbang jika dibandingkan dengan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah.
- Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang belum dioptimalkan secara sempurna. Seharusnya penangkapan ikan di laut dapat dilakukan pada daerah seluas 408,9151 km² per tahun sedangkan faktanya hanya dilakukan pada daerah penangkapan seluas 7,112 km². Budidaya yang seharusnya dapat dioptimalkan dengan lahan seluas 126,9682 ha per tahun, faktanya hanya dilakukan pada lahan seluas 72 ha. Pada pengolahan hasil perikanan seharusnya dapat menghasilkan 18.329,3 ton per tahun tetapi faktanya hanya dapat menghasilkan 9.925 ton saja.

Karena adanya faktor-faktor kendala diatas, maka sehubungan dengan kendala tersebut seharusnya Pemerintah Daerah bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek dapat melakukan usaha sebagai alternatif kebijakan seperti :

- Menugaskan staf/ karyawan dinas di lapang untuk meninjau masyarakat yang mempunyai usaha perikanan yang sudah memenuhi standart usaha dan memberikan penyuluhan agar mereka mengurus Surat Ijin Usaha Perikanan. Apabila mereka sudah mempunyai Surat Ijin Usaha maka dapat dikenakan retribusi, dimana retribusi tersebut dapat menambah kontribusi terhadap PAD.
- Dinas Perikanan dan Kelautan harus bisa melaksanakan proyek-proyek subsektor perikanan seperti melakukan usaha untuk memperkuat permodalan para nelayan dan pembudidaya ikan dengan cara memberikan bantuan modal melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan kegiatan Penguatan Modal Masyarakat Pembudidaya Ikan, pengembangan budidaya air tawar dengan membentuk UPR (Unit Pembenihan Rakyat) agar dari penerimaannya dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD di Kabupaten Trenggalek.
- Setiap tahun optimalisasi TPI di Kecamatan Watulimo dan Munjungan harus selalu ditingkatkan berkaitan dengan penertiban untuk meminimalkan kebocoran ikan oleh aparat keamanan
- DKP memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai kepada para nelayan agar para nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapannya seperti pengadaan mesin perahu, pengadaan jaring payang dan udang. (Laporan Tahunan DKP Kabupaten Trenggalek, 2007)

Dari hasil penelitian dapat disarankan

1. Pemerintah

Dari hasil pengoptimalisasian sumberdaya perikanan agar ditindak lanjuti dan disalurkan dalam bentuk kebijakan yang dapat membantu masyarakat pesisir/ nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan.

2. Mahasiswa

Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam pembuatan perencanaan wilayah sektor perikanan.

3. Masyarakat

Masyarakat dapat meningkatkan usaha perikanan agar mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD.

4. Peneliti

Dengan informasi yang diberikan melalui hasil penelitian diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan lebih memacu/ mendalami mengenai perencanaan wilayah sektor perikanan.



DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Kerangka Pemikiran	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
1.6 Tempat Dan waktu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Perencanaan	8
2.3 Wilayah.....	10
2.4 Perikanan	11
2.5 Potensi Perikanan	12
2.5.1 Pengertian Potensi Perikanan.....	12
2.5.2 Jenis – jenis Potensi Perikanan.....	12
2.6 Otonomi Daerah	13
2.7 Pendapatan Asli Daerah	14
2.8 Kebijakan.....	16
2.8.1 Definisi Kebijakan.....	16
2.8.2 Kebijakan Pembangunan Perikanan	17
2.9 Perencanaan Wilayah Sektor Perikanan.....	17
2.10 Model Ekonomi Basis.....	17
2.11 Analisis Perencanaan Wilayah Sektor Perikanan	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	21
3.2 Objek Penelitian	21
3.3 Metode Penelitian.....	21
3.4 Sumber Data	22
3.4.1 Data Sekunder	22
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	22
3.5.1 Dokumentasi	22
3.6 Analisis data	23
3.6.1 Deskriptif Kuantitatif.....	23
3.6.1.1 Analisis Basis Ekonomi	23

3.6.1.2 Analisis Linear Programming.....	24
BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	26
4.1 Letak Geografi dan Topografi Kabupaten Trenggalek	26
4.1.1 Letak Geografi.....	26
4.1.2 Letak Topografi	26
4.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Trenggalek	27
4.3 Keadaan Umum Perikanan Kabupaten Trenggalek.....	27
4.3.1 Produksi Penangkapan Ikan Di Laut.....	28
4.3.2 Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	31
4.3.3 Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan	32
4.3.4 Budidaya Ikan Air Tawar	33
4.3.5 Budidaya Air Payau	36
4.3.6 Budidaya Laut	36
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
5.1 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Sektor Perikanan Kabupaten Trenggalek..	38
5.2 Optimisasi Sektor Perikanan Dalam Meningkatkan PAD	40
5.3 Alternatif Kebijakan Yang Diterapkan Berkaitan Dengan Sumberdaya Perikanan Dalam Rangka Peningkatan PAD Kabupaten Trenggalek.....	51
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
6.1 Kesimpulan.....	57
6.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data untuk model linear programming	20
2. Data dari hasil penelitian	24
3. Penyebaran penduduk di 14 kecamatan pada tahun 2007	27
4. Data produksi hasil tangkapan pada setiap lokasi	28
5. Data armada perikanan Kabupaten Trenggalek.....	28
6. Jumlah alat tangkap tahun 2006 dan 2007 di Kabupaten Trenggalek	29
7. Jumlah produksi menurut jenis alat tangkap yang digunakan.....	29
8. Jumlah nelayan di Kabupaten Trenggalek tahun 2007	30
9. Produksi ikan yang tertangkap pada setiap jenis ikan selama tahun 2006 dan 2007	30
10. Hasil tangkapan ikan di perairan umum	31
11. Perkembangan produksi ikan hasil olahan di Kabupaten Trenggalek.....	33
12. Jumlah ikan yang diolah dan yang dikonsumsi segar	33
13. Perkembangan kolam	34
14. Produksi ikan di kolam selama 2 tahun terakhir	34
15. Produksi Benih BBI Trenggalek Tahun 2007	35
16. Produksi ikan dari UPR di Kabupaten Trenggalek dalam tahun 2006 dan tahun 2007	36
17. Produksi budidaya tambak tahun 2006	36
18. Analisis Location Quotient (LQ) dengan indikator PAD harga yang berlaku	39
19. Kapasitas armada Penangkapan ikan di laut pada tahun 2007	40
20. Perkembangan alat tangkap (penangkapan ikan di laut) pada tahun 2007	41
21. Rincian alokasi dana pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2007	42
22. Kebutuhan tenaga kerja untuk aktifitas penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, budidaya,dan pengolahan hasil perikanan	44

23. Koefisien anggaran yang digunakan untuk aktivitas penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan.....	45
24. Koefisien pendapatan yang diperoleh dari aktivitas perikanan	45
25. Tabel simplek perikanan yang ada di Kabupaten Trenggalek.....	47
26. Solusi Alokasi (penggunaan) Sumberdaya Optimal.....	48
27. Peningkatan Pendapatan Atas Alokasi Sumberdaya Optimal.....	48
28. Nilai variabel putusan dan reduced cost.....	49
29. Nilai variabel yang tidak dianjurkan menjadi putusan dan reduced cost.....	49
30. Nilai kisaran kepekaan koefisien aktifitas fungsi tujuan.....	50
31. Nilai kisaran kepekaan kendala (RHS).....	50
32. Penyerapan faktor-faktor produksi alat tangkap, jumlah armada, tenaga kerja dan modal selama satu tahun	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Kerangka pemikiran 5



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Trenggalek.....	63
2. Hasil optimalisasi dengan linear programming.....	64



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dimana wilayahnya terdiri dari sekitar 18.000 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah perairan Indonesia meliputi sekitar 62% dari luas teritorial, serta memiliki potensi dan keanekaragaman jenis hayati dan sumberdaya alam yang sangat besar, sehingga merupakan wilayah yang sangat produktif salah satunya pada Kabupaten Trenggalek.

Kabupaten Trenggalek berada di Jawa Timur bagian selatan dan berbatasan dengan Samudera Hindia. Potensi sumberdaya laut di Kabupaten Trenggalek cukup besar. Panjang pantai di Kabupaten Trenggalek adalah 96 km yang meliputi 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Watulimo, Munjungan dan Panggul. Kabupaten Trenggalek memiliki wilayah laut yang cukup potensial. Luas wilayah laut 4 mil adalah ± 71.117 ha yang dalam pengelolaannya merupakan kewenangan kabupaten. Sampai saat ini tingkat eksploitasi/ pemanfaatan sumberdaya laut tersebut baru sekitar 20 % dari potensi yang tersedia. (DKP Kabupaten Trenggalek, 2007)

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada maka dengan sendirinya pengelolaan sumberdaya perikanan dapat berjalan dengan baik. Menurut Hartoto (1999) di dalam Hardjamulya, dkk (2001) menyatakan bahwa secara implisit peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang relatif lebih luas pada pemerintahan tingkat lokal (kabupaten dan kota) agar mampu melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum dalam lingkup wilayahnya masing-masing. Dengan demikian pemerintah daerah akan mempunyai peluang

untuk mendapatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumberdaya alam tersebut dan dapat memanfaatkan guna pembangunan ekonomi di wilayahnya.

Hampir seluruh penduduk berdiam atau berada di wilayah daratan, oleh karena itu pembangunan wilayah (daratan) sangat penting peranannya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas berbagai sektor pembangunan, dan keberhasilannya dicerminkan oleh peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan yang dilaksanakan berhasil mencapai sasarannya, maka harus ditunjang oleh penyusunan rencana yang komprehensif dan terarah. Penyusunan rencana atau perencanaan itu merupakan suatu alat atau cara untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dengan baik. Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan perencanaan dilakukan perkiraan mengenai potensi, prospek, hambatan dan resiko yang dihadapi. Dengan perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif yang terbaik dan memilih kombinasi yang terbaik. Perencanaan wilayah dimaksudkan agar semua wilayah dapat melaksanakan pembangunannya berdasarkan potensi yang dimiliki (Adisasmito, 2006)

Dari kenyataan tersebut kiranya perlu adanya kajian lebih mendalam dari perencanaan wilayah sektor perikanan sehingga melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul : **“Perencanaan Wilayah Sektor Perikanan Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pada masa sekarang ini jumlah penduduk yang ada semakin bertambah dari waktu ke waktu. Adanya pertambahan penduduk tersebut tentu saja menimbulkan dampak terhadap berbagai bidang kehidupan. Salah satu dampak adanya

pertambahan penduduk dan segala kegiatan pembangunannya adalah semakin terbatasnya sumberdaya yang ada di daratan. Keterbatasan sumberdaya yang ada di daratan ini berarti bahwa lahan pertanian yang ada di dunia pada saat ini akan semakin sempit. Semakin sempitnya lahan pertanian akan membawa akibat yang cukup besar, yaitu sumbangan bidang pertanian yang selama ini menjadi salah satu sektor andalan pemasukan terhadap PAD akan semakin berkurang. Dengan kondisi yang demikian ini, maka dibutuhkan adanya alternatif lain untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan serta ketersediaan gizi bagi masyarakat.

Kabupaten Trenggalek mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup besar baik pada perairan laut, perairan payau dan perairan tawar. Menurut penelitian dari luas perairan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Kabupaten Trenggalek seluas 35.558 Km². tingkat eksploitasinya masih sekitar 20 % dari potensi yang tersedia. Potensi areal tambak terhampar lebih dari 350 Ha yang belum dimanfaatkan. Sedang perairan air tawar semakin marak dengan semakin besarnya minat masyarakat untuk melakukan usaha budidaya ikan. Kenyataan diatas merupakan faktor pendorong yang besar untuk memacu pembangunan perikanan di Kabupaten Trenggalek (DKP Kabupaten Trenggalek, 2007)

Pelaksanaan pembangunan telah membuahkan hasil yang menggembirakan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2007 tercatat sebesar 4,79 % dimana sektor pertanian masih dominan dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 34,83 % disusul sektor jasa – jasa 21,72 %, sektor perdagangan 18,69 %, serta diikuti sektor – sektor lainnya. Namun pemerintah dalam hal ini masih perlu meningkatkan pelaksanaan pembangunan agar hasil yang dicapai lebih optimal lagi. Pendapatan perkapita penduduk secara nominal mencapai 3,54 juta rupiah, sedangkan secara riil mencapai 2,43 juta rupiah (BPS, 2007)

Sektor perikanan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis kelompok usaha, antara lain kelompok usaha penangkapan, budidaya laut, budidaya air tawar,

pengolahan dan pemasaran. Dari kelompok usaha tersebut dapat dibedakan lagi menjadi beberapa pola usaha, misalnya pola usaha penangkapan ikan di laut, budidaya sawah tambak dan lain sebagainya. Besar kecilnya nilai kontribusi yang akan diberikan oleh tiap-tiap pola produksi usaha perikanan tersebut akan berpengaruh terhadap nilai kontribusi yang diberikan oleh sektor perikanan terhadap PAD di Kabupaten Trenggalek.

Dari uraian di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang perlu dikaji di dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah sektor perikanan merupakan sektor basis dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana perencanaan wilayah sektor perikanan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Trenggalek ?
3. Bagaimana kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Trenggalek khususnya DKP untuk sumberdaya perikanan dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Trenggalek ?

1.3 Kerangka Pemikiran

Potensi sumberdaya perikanan di Kabupaten Trenggalek terdiri dari usaha penangkapan ikan di laut, usaha penangkapan ikan di perairan umum, usaha budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Dari keempat sumberdaya tersebut belum dapat menghasilkan pendapatan yang optimal sehingga perlu adanya suatu perencanaan wilayah sektor perikanan dengan analisis *Location Quotient* dan *Linear Programming* yang bertujuan untuk mengoptimalkan PAD. Sehingga nanti diharapkan muncul suatu kebijakan untuk perencanaan wilayah sektor perikanan seperti diterangkan dalam gambar 1.



1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Basis atau tidaknya sektor perikanan terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Trenggalek.
2. Perencanaan wilayah sektor perikanan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Trenggalek.
3. Alternatif kebijakan atau solusi yang dapat diterapkan berkaitan dengan sumberdaya perikanan dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Trenggalek

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan sektor perikanan khususnya dalam pembuatan perencanaan pembangunan perikanan.

2. Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pembuatan perencanaan dan kondisi usaha perikanan.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha perikanan.

3. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menambah informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mengenai perencanaan wilayah sektor perikanan

1.6 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur.

Waktu pelaksanaan pada Bulan Juni 2008.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pendapatan petambak dan pendapatan regional perikanan tambak relatif rendah, disebabkan sumberdaya belum dialokasikan secara optimal oleh karena itu perencanaan alokasi sumberdaya tambak optimum yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perlu diteliti. Pendapatan maksimal regional tercapai bila pemanfaatan lahan tambak yang ada di daerah penelitian seluas 2850 hektar dilaksanakan dengan pola usaha monokultur udang windu sesuai anjuran dalam INTAM A₂. Bila solusi optimal ini dapat dilaksanakan maka akan terjadi peningkatan PAD dari sektor perikanan tambak di daerah penelitian (Tjahjono, 2005)

Dzulfikar (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan, dapat dilakukan dengan cara pengelolaan yang optimal pada sumberdaya perikanan yang ada. Pengelolaan yang baik akan berdampak pada peningkatan produksi, semakin tinggi produksi yang dihasilkan maka semakin tinggi pula kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jenis perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan terdiri dari usaha perikanan tangkap, usaha budidaya, usaha pemasaran, usaha pengolahan.

Dhewi (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk menilai hubungan nilai kontribusi sektor perikanan terhadap PAD maka dilakukan uji R^2 , F dan t. dan untuk mengetahui adanya *overspecialization* atau *underspecialization* dari sektor perikanan yang ada di Kabupaten Banyuwangi diambil dari variabel PAD sektor perikanan Kabupaten Banyuwangi dengan daerah referensinya adalah PAD dari sektor perikanan Propinsi Jawa Timur.

2.2 Perencanaan

Perencanaan adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang (Suwignjo, 1985)

Menurut Djamaluddin (1982) perencanaan adalah segala macam kegiatan yang di susun dan dilalui dengan maksud untuk memilih rencana yang paling optimal dapat memberikan manfaat baginya dalam pelaksanaan suatu atau beberapa usaha. Dalam pengertian ini beberapa hal harus diperhatikan yaitu :

1. Kegiatan permulaan yaitu penetapan dan penyusunan arah dan tujuan serta sasaran tertentu yang hendak dicapai.
2. Kegiatan pertengahan yaitu penelitian dan penilaian keadaan serta analisa berbagai macam faktor dalam ruang lingkup masalah-masalah rencana yang dihadapi.
3. Kegiatan terakhir yaitu penetapan dan penyusunan rencana dari berbagai macam alternatif yang terbuka

Perencanaan merupakan salah satu fungsi organik manajemen merupakan syarat mutlak dilakukan oleh dana dalam setiap organisasi, apapun tujuannya, dan apapun kegiatannya. Negara juga merupakan salah satu bentuk organisasi dan oleh karena itu dalam usaha pencapaian tujuan nasionalnya melalui berbagai kegiatan pembangunan termasuk sektor perikanan, aparatur negara mau tidak mau harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan. Perencanaan memegang peran yang amat penting dalam pembangunan karena :

1. Dikaitkan dengan pelaksanaan operasional, rencana merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas untuk menghindari pemborosan berkat keterarahan kegiatan untuk mencapai tujuan.
2. Dengan perencanaan yang matang, dapat dilakukan perkiraan keadaan mengenai hal-hal dan prospek perkembangan masa depan yang pada akhirnya dapat mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi.

3. Perencanaan dapat memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik melalui pangkajian yang mendalam, dan dapat memberi petunjuk tentang ciri-ciri setiap alternatif yang ada baik bersifat positif maupun negatif.
4. Dengan adanya perencanaan dapat dijadikan sebagai alat untuk menetapkan standart prestasi yang baku dan antara lain berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan usaha.
5. Dengan adanya perencanaan akan tergambar pula jenis dan bentuk satuan kerja penyelenggara semua kegiatan yang sifatnya berlanjut dan karenanya melembaga.
6. Rencana dapat dijadikan dasar utama untuk penjabaran program kerja secara sistematis.
7. Dengan adanya perencanaan akan dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian bahkan juga penilaian.
8. Dengan perencanaan akan dapat diketahui jumlah jenis keahlian, dan ketrampilan tenaga kerja yang diperlukan dapat ditetapkan dengan lebih akurat.
9. Implikasi pembiayaan pun dapat terlihat dengan jelas dalam suatu rencana. Dengan perencanaan yang jelas sarana dan prasarana kerja yang mutlak diperlukan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan sebenarnya (Siagian, 1985)

Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan.

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tinjauan-tinjauan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu pikiran (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas memilih urutan-urutan pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standart untuk mengadakan pengawasan/ evaluasi.

2.3 Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Dahuri, 2002).

Menurut Budiharsono (2001) wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya bergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu :

(1) Wilayah homogen

Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek/ kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama.

(2) Wilayah nodal

Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi.

(3) Wilayah perencanaan

Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan.

(4) Wilayah administratif

Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti propinsi, kabupaten, kecamatan, desa/ kelurahan dan RT/ RW.

2.4 Perikanan

Dalam Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 di jelaskan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Usaha perikanan dapat dipandang sebagai suatu perpaduan faktor produksi, atau sebagai suatu barang antara yang dihasilkan faktor-faktor produksi klasik tenaga kerja dan barang modal atau apapun yang dianggap jenis ini.(Hannesson, 1988)

Menurut Dzulfikar (2007), usaha perikanan adalah suatu usaha terpadu mulai dari produksi hingga pemasaran yang dikelola secara profesional dan bertanggung jawab didasari azas kelestarian dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK. Usaha perikanan yang ada sangat beragam, mulai dari usaha menangkap ikan, membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Usaha penangkapan ikan dilakukan dip perairan bebas, dalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan yaitu di laut dan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan sejenisnya) dengan mempergunakan alat tangkap ikan. Pembudidayaan ikan merupakan kegiatan memelihara atau membesarkan ikan termasuk melakukan

pembenihan atau membiakkan ikan untuk menghasilkan benih serta memanen hasilnya.

2.5 Potensi Perikanan

2.5.1 Pengertian Potensi Perikanan

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimaksud potensi sumberdaya mencakup sumberdaya kelautan dan perikanan yang penyajiannya diuraikan menurut struktur sumberdaya tersebut, sebaran menurut lokasi, luas dan daya dukung. Struktur sumberdaya kelautan diuraikan menurut kategori pulau-pulau kecil, barang muatan kapal tenggelam (BMKT), tambang pasir laut, garam dan non hayati lainnya. Struktur sumberdaya perikanan diuraikan menurut perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sumberdaya perikanan tangkap mencakup perikanan laut dan perikanan perairan umum, termasuk sumberdaya perikanan laut adalah panjang garis pantai, luas terumbu karang, padang lamun, laut dalam dan laut dangkal. Termasuk sumberdaya perikanan perairan umum adalah sungai, rawa, danau, waduk, dan saluran irigasi. Sumberdaya perikanan budidaya mencakup lingkungan sumberdaya perairan tawar, payau dan laut (Cholik, 2006)

Potensi perikanan Indonesia tidak saja potensi sumberdaya ikan yang sebesar 6,2 juta ton / tahun. Namun yang juga strategis adalah potensi infrastruktur yang tersedia dan investasi yang sudah ditanamkan. Artinya seluruh potensi yang ada baik sumberdaya ikan, infrastruktur, sumberdaya manusia dan investasi, hendaknya dapat dioptimalisasikan pemanfaatannya, sehingga dapat memberikan kontribusi riil bagi pembangunan perikanan, khususnya dalam rangka meningkatkan produksi perikanan (Cholik, 2006)

2.5.2 Jenis – Jenis Potensi Perikanan

Potensi pembangunan (ekonomi) perikanan, jika dirinci atas sektor pembangunan, meliputi sepuluh sektor utama yaitu :

1. Perikanan tangkap

2. Perikanan budidaya
3. Industri pengolahan hasil perikanan
4. Industri bioteknologi hasil perikanan
5. Pariwisata bahari
6. Pertambangan dan energi
7. Perhubungan laut
8. Industri dan jasa maritim
9. Pulau-pulau kecil
10. Sumberdaya non konvensional seperti *deep sea water industries*, *hydrothermal vents* dan benda-benda berharga asal muatan kapal tenggelam (harta karun di dasar laut) (Cholik,. 2006)

2.6 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI (Abidin, 2006)

Menurut Nurcholis (2005), otonomi daerah dalam artian pertama adalah organisasi/ organ/ badan pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. Pengertian kedua tentang otonomi daerah adalah menunjukkan pada fungsi dan kegiatannya yang dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah tersebut. Sedangkan pengertian otonomi daerah yang ketiga adalah menjelaskan bahwa secara substansial merupakan suatu

wewenang yang mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu.

Konsep otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 1992 dengan lahirnya UU No 22/ 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, merupakan lompatan jauh ke depan dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini telah berimplikasi pada sistem kewenangan dan sekaligus perubahan dalam hal keuangan. Tuntutan perubahan dalam aspek kewenangan, aspek penataan kelembagaan dan keuangan yang terjadi pada era otonomi daerah saat ini sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Kesiapan daerah terutama dari segi SDM, sarana prasarana, keuangan, kelembagaan, aturan pelaksanaan yang mendukung, lengkap dan memadai sangat mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan otonom ini. Dalam kata lain subjektivitas kedaerahan dapat mengganggu pelaksanaannya. Lebih lanjut konflik kedaerahan akan muncul dan mungkin juga konflik daerah dengan pusat. (Abidin, 2006)

Menurut Tribawono dalam Abidin (2006) ada dua hal penting yang harus diantisipasi dalam era otonomi daerah ini demi kelancaran pelaksanaannya, yaitu :

- a. Kemungkinan mencuatnya kerawanan konflik kewenangan antar daerah, antara pemerintahan pusat dengan daerah.
- b. Menggemanya tuntutan pelaksanaan otonomi daerah secara total dan harapan terlaksana dalam waktu dekat, bahkan ada yang lebih dari tuntutan menjadi daerah otonomi tetapi justru ingin memisahkan dari NKRI.

2.7 Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan Pendapatan Daerah merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah terdapat tuntutan untuk meningkatkan penerimaan PAD. Agar diupayakan

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah (Adisasmita, 2006)

Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah yaitu :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

c. Pinjaman daerah

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Menurut Dewi (2002) dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan PAD diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Menurut kamus ilmiah populer, identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah : meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber PAD dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Dikatakan didalam UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi, PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut. Yang dimaksud dengan pajak daerah

adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah dimana tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Hasil penerimaan dari retribusi tertentu kabupaten diperuntukkan kepada desa. Penetapannya diatur dengan perda kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa didalam penyediaan layanan tersebut.

2.8 Kebijakan

2.8.1 Definisi Kebijakan

Secara harfiah ilmu kebijaksanaan adalah terjemahan langsung dari kata *policy science* (Dror,1968). Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian *public* itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum (Indrayani, 2005).

Dengan demikian perbedaan makna perkataan kebijaksanaan dan kebijakan tidak menjadi persoalan, selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum. Perbedaan kata kebijakan dengan kebijaksanaan berasal dari keinginan untuk membedakan istilah *policy* sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat (Indrayani, 2005).

2.8.2 Kebijakan Pembangunan Perikanan

Kebijakan pembangunan perikanan dapat dibedakan dalam dua pengertian. Pertama kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan yang melakukan manajemen perikanan. Kedua kebijakan substansial yang berkaitan dengan operasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan (Indrayani, 2005).

2.9 Perencanaan Wilayah Sektor Perikanan

Sumberdaya alam khususnya di wilayah pesisir dan laut (perikanan) itu merupakan aset yang mempunyai arti strategis yang sangat besar dan bersifat menjanjikan (prospektif) untuk masa depan, maka dari itu perlu adanya suatu perencanaan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Perencanaan wilayah sektor perikanan yang dimaksud adalah menjelaskan batasan-batasan mengenai perencanaan dan pendekatan regional dikaitkan dengan implikasi kebijakan pengembangan wilayah (Adisasmita, 2006)

2.10 Model Ekonomi Basis

Menurut Budiharsono (2001) inti dari model ekonomi basis adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor tersebut berupa barang-barang dan jasa, termasuk tenaga kerja. Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan setor basis atau non basis dapat digunakan beberapa metode yaitu metode pengukuran langsung dan metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran langsung dapat dengan survei langsung untuk mengidentifikasi sektor mana yang merupakan sektor basis. Metode ini dapat menentukan sektor basis secara tepat akan tetapi memerlukan biaya, waktu dan tenaga kerja yang banyak. Metode tidak langsung dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) yang dirumuskan :

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana :

v_i = Pendapatan sektor i pada tingkat wilayah

v_t = Pendapatan total wilayah

V_i = Pendapatan sektor i pada tingkat nasional

V_t = Pendapatan total nasional

2.11 Analisis Perencanaan Wilayah Sektor Perikanan

Dalam merencanakan wilayah sektor perikanan yang ada di suatu wilayah, maka dapat menggunakan suatu program khusus komputer yang dinamakan program POM for windows, yang di dalamnya memuat analisis data Linear Programming.

Tujuan penggunaan program linier ini adalah untuk menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah. Kemudian dipilih kombinasi yang terbaik, dalam rangka menyusun strategi alokasi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal (Budiharsono, 2001)

Analisis ini digunakan untuk pemecahan masalah yang menghendaki tujuan tunggal yang pada dasarnya memiliki tiga unsur utama, yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Variabel keputusan merupakan variabel yang menentukan nilai tujuan yang hendak dicapai dan harus ditentukan terlebih dahulu sebelum merumuskan fungsi tujuan dan kendala. Fungsi tujuan merupakan model untuk menyelesaikan masalah. Fungsi kendala menyajikan batasan sumberdaya yang tersedia untuk digunakan. Dalam penerapannya, baik fungsi tujuan maupun fungsi kendala disajikan dalam bentuk fungsi matematik linear (Syamsul dan Hendri, 2003).

Agar memudahkan pembahasan model LP ini, digunakan simbol-simbol sebagai berikut :

- m = macam batasan-batasan sumber atau fasilitas yang tersedia
- n = macam kegiatan-kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas tersebut
- i = nomor setiap macam sumber atau fasilitas yang tersedia
($i = 1, 2, \dots, m$)
- j = nomor setiap macam kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas yang tersedia ($j = 1, 2, \dots, n$)
- x_j = tingkat kegiatan ke, j . ($j = 1, 2, \dots, n$)
- a_{ij} = banyaknya sumber i yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit keluaran (output) kegiatan j ($i = 1, 2, \dots, m$, dan $j = 1, 2, \dots, n$)
- b_i = banyaknya sumber (fasilitas) i yang tersedia untuk dialokasikan untuk setiap unit kegiatan ($i = 1, 2, \dots, m$)
- Z = nilai yang dioptimalkan (maksimum dan minimum)
- C_j = kenaikan nilai Z apabila ada pertambahan tingkat kegiatan (x_j) dengan satu satuan (unit) ; atau merupakan sumbangan setiap satuan keluaran kegiatan j terhadap nilai Z (Subagyo dkk, 1999)

Keseluruhan simbol-simbol di atas selanjutnya disusun ke dalam bentuk tabel standar LP seperti tampak pada tabel 1.

Tabel 1. Data untuk model linear programming

Kegiatan Sumber	Pemakaian sumber per unit Kegiatan (keluaran)					Kapasitas Sumber
	1	2	3		n	
1	a_{11}	a_{12}	a_{13}		a_{1n}	b_1
2	a_{21}	a_{22}	a_{23}		a_{2n}	b_2
3	a_{31}	a_{32}	a_{33}		a_{3n}	b_3
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
m	a_{m1}	a_{m2}	a_{m3}		a_{nm}	b_m
ΔZ pertambahan tiap unit	C_1	C_2	C_3		C_n	
Tingkat Kegiatan	X_1	X_2	X_3		X_n	

Sumber : Subagyo dkk, 1999



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur. Waktu pelaksanaan pada Bulan Juni 2008.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh kegiatan usaha perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek meliputi penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, usaha budidaya air tawar, usaha budidaya air payau (tambak), dan pengolahan hasil perikanan.

3.3 Metode Penelitian

Penentuan metode ilmiah diperlukan untuk membatasi teknik dan prosedur penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian tipe penjelasan (*Explanatory* atau *Confirmatory research*) dengan metode survei. Menurut Kuncoro (2005), *Confirmatory Research* disebut juga penelitian konklusif (*Conclusive Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji atau membuktikan sesuatu dan untuk membantu si peneliti dalam memilih tindakan khusus selanjutnya.

Ditambahkan oleh Singarimbun (1982), bahwa penelitian penjelasan (*explanatory* atau *confirmatory research*) menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu dinamakan juga penelitian pengujian hipotesa atau *testing research*. Walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian relational fokusnya terletak pada penjelasan hubungan-hubungan antar variabel.

Metode survei adalah pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu atau studi ekstensif yang dipolakan untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan.

Tujuan survei adalah mendapatkan gambaran-gambaran yang mewakili daerah itu dengan benar dan ditunjukan kearah pengumpulan fakta-fakta belaka (Moehar,2002)

3.4 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan untuk analisis Location Quotient menggunakan data sekunder dari BPS dan DKP Kabupaten Trenggalek serta BPS dan DKP Propinsi Jawa Timur mulai tahun 2001 sampai dengan 2007 agar dapat mewakili dalam penentuan lokasi basis yaitu data PAD. Untuk analisis linear programming menggunakan data dari DKP Kabupaten Trenggalek pada tahun 2007. Datanya meliputi data yang berhubungan dengan penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, budidaya dan pengolahan hasil perikanan yaitu jumlah alat tangkap, jumlah armada, jumlah tenaga kerja, dan pendapatan dari masing-masing usaha perikanan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

3.5.1 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dari lembaga-lembaga terkait seperti : Kantor Badan Pusat Statistik Jawa Timur tentang PAD Propinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek tentang keadaan umum daerah perikanan yang ada di wilayah di Kabupaten Trenggalek, kebijakan yang diambil berkaitan dengan peningkatan PAD. Kantor BPS Kabupaten Trenggalek tentang keadaan penduduk Kabupaten Trenggalek dan PAD Kabupaten Trenggalek

3.6 Analisis Data

Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data, ditabulasi, sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah dan/ atau hipotesis penelitian, juga melakukan penghitungan-penghitungan tertentu sesuai dengan jenis pengolahan statistik yang digunakan di masing-masing masalah dan/ atau hipotesis penelitian, dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masalah atau hipotesis penelitian maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti (Faisal, 2005).

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Deskriptif Kuantitatif

Menggambarkan keadaan atau status fenomena yang dinyatakan dengan angka-angka hasil-hasil perhitungan atau perhitungan yang dapat diproses dengan beberapa cara (Arikunto, 1997)

Yang termasuk analisa data deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1.1 Analisis Basis Ekonomi

Dalam upaya mengembangkan kawasan tersebut kita perlu untuk melakukan klasifikasi sektor sebagai sektor basis pengembangan atau bukan. Klasifikasi sektor-sektor pada suatu wilayah ke dalam sektor basis atau non basis dapat dilakukan dengan analisis LQ (*Location Quotient*) (Budiharsono, 2001)

Alat analisis tersebut secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana :

v_i = PAD sektor perikanan Kabupaten Trenggalek

v_t = PAD seluruh sektor Kabupaten Trenggalek

V_i = PAD sektor perikanan Propinsi Jawa Timur

V_t = PAD seluruh sektor Propinsi Jawa Timur

Apabila LQ suatu sektor (industri) ≥ 1 , maka sektor (industri) tersebut merupakan sektor basis. Sedangkan bila LQ suatu sektor (industri) < 1 , maka sektor industri tersebut merupakan sektor non basis.

3.6.1.2 Analisis Linear Programming

Analisis linear programming ini di gunakan untuk memaksimumkan fungsi tujuan dan meminimalkan faktor kendala. Dimana fungsi tujuan yang dimaksudkan adalah Pendapatan Asli Daerah dan faktor kendalanya adalah faktor-faktor produksi perikanan yang ada di Kabupaten Trenggalek yang meliputi usaha budidaya, penangkapan ikan di laut, usaha pengolahan hasil perikanan, pembenihan. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dimasukkan dalam model linear programming. Model linear programming tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Data dari hasil penelitian

Kegiatan Sumber	Pemakaian sumber per unit Kegiatan (keluaran)				Kapasitas Sumber
	1	2	3	4	
Alat Tangkap	a_{11}	-	-	-	b_1
Armada	a_{21}	-	-	-	b_2
Tenaga Kerja	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	b_3
Anggaran	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	b_4
ΔZ pertambahan tiap unit	C_1	C_2	C_3	C_4	
Tingkat Kegiatan	X_1	X_2	X_3	X_4	

Keterangan :

X_1 : Penangkapan ikan di laut

X_2 : Penangkapan ikan di perairan umum

X_3 : Budidaya

- X_4 : Pengolahan hasil perikanan
 a : Sumberdaya yang digunakan
 b : Jumlah sumberdaya yang tersedia
 C : Keuntungan yang didapat dari masing-masing aktivitas

Berdasarkan Tabel 1. secara sistematis model dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Fungsi tujuan :

$$Z \max = C_1 X_1 + C_2 X_2 + C_3 X_3 + C_4 X_4$$

2. Fungsi kendala :

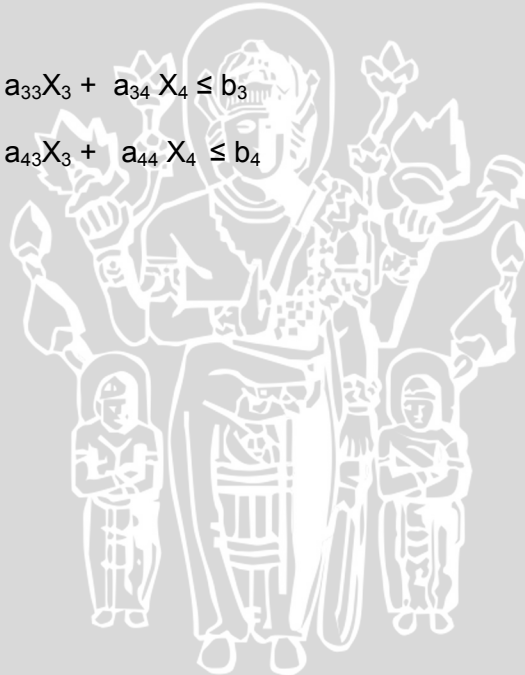
$$a_{11}X_1 \leq b_1$$

$$a_{21}X_1 \leq b_2$$

$$a_{31}X_1 + a_{32}X_2 + a_{33}X_3 + a_{34}X_4 \leq b_3$$

$$a_{41}X_1 + a_{42}X_2 + a_{43}X_3 + a_{44}X_4 \leq b_4$$

3. Asumsi $X_1, X_2 \leq 0$



BAB IV

KEADAAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografi dan Topografi Kabupaten Trenggalek

4.1.1 Letak Geografi

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan. Kabupaten Trenggalek ini terletak koordinat $111^{\circ} 24'$ hingga $112^{\circ} 11'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 53'$ hingga $8^{\circ} 34'$ Lintang Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo, sebelah Timur Kabupaten Tulungagung, sebelah Selatan Samudra Indonesia dan sebelah Barat Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1.

Luas wilayah $1.261.400 \text{ Km}^2$ terdiri dari $2/3$ tanah pegunungan dan sisanya ($1/3$ bagian) merupakan dataran rendah. Tinggi dari permukaan air laut pada beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek adalah sekitar $\pm 150 - 450 \text{ m}$ terdapat di Kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo bagian Tengah, Kampak bagian Timur, Gandusari, Karang Barat Daya dan sebagian Kecamatan Bendungan.

Adapun wilayah kecamatan yang mempunyai ketinggian antara $900 \text{ m} - 1500 \text{ m}$ terdapat pada Kecamatan Pule bagian Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Dongko.

4.1.2 Letak Topografi

Perlu diketahui bahwa wilayah Kabupaten Trenggalek mempunyai luas 126.140 Ha , secara topografi sebagian besar wilayahnya ($2/3$ bagian) merupakan dataran tinggi dan sebagian kecil ($1/3$ bagian) lainnya merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian tanah berkisar antara 0 sampai dengan 1.500 m dari permukaan laut.

Dari kemiringan tanah terlihat jelas sebagian besar dari Kabupaten Trenggalek mempunyai kemiringan antara $0 - 8 \%$ sedangkan kemiringan $8 \% - 15$

% terdapat pada Kecamatan panggul bagian Utara, kemiringan 15 % - 25 % terdapat pada Kecamatan Munjungan dan Watulimo, sedangkan kemiringan lebih dari 25 % terdapat di Kecamatan Pule.

4.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Trenggalek

Seiring dengan laju pembangunan di Kabupaten Trenggalek maka jumlah penduduk pun bertambah dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2006 jumlah penduduk tercatat 680.929 jiwa sedangkan pada tahun 2007 tercatat sebanyak 685.989 jiwa atau naik sebesar 0,72 %.

Penyebaran penduduk di 14 kecamatan pada tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Penyebaran Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2007

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA	PENDUDUK			KEPADATAN PENDUDUK (Orang/Km ²)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Panggul	20.090	38.036	39.032	77.068	586
2.	Munjungan	12.061	23.373	23.562	46.935	303
3.	Watulimo	16.703	30.847	31.014	61.861	401
4.	Kampak	10.287	18.218	17.835	36.053	456
5.	Dongko	16.775	31.103	31.619	62.722	444
6.	Pule	13.836	25.740	26.026	51.766	438
7.	Karangan	13.018	21.815	21.952	43.767	860
8.	Suruh	7.610	12.815	12.761	25.730	507
9.	Gandusari	14.153	24.187	24.126	48.313	879
10.	Durenan	13.590	23.417	24.340	47.757	835
11.	Pogalan	13.547	23.631	23.601	47.232	1.130
12.	Trenggalek	16.957	31.096	31.288	62.384	1.020
13.	Tugu	14.095	23.576	23.933	47.509	636
14.	Bendungan	7.085	1.721	13.171	26.892	296
	Jumlah	189.807	341.729	344.260	685.989	544

Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek, 2008

Penyebaran penduduk di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa merata. Mobilitas penduduk rendah kecuali sebagian angkatan kerja yang terpaksa mencari lapangan kerja keluar daerah.

4.3 Keadaan Umum Perikanan Kabupaten Trenggalek

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Trenggalek terdiri dari penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan, kegiatan budidaya air tawar, budidaya air payau (tambak), budidaya laut.

4.3.1 Produksi Penangkapan Ikan Di Laut

Produksi hasil tangkapan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2007 masih didominasi oleh Kecamatan Watulimo, disebabkan karena jumlah armada, ukuran kapal, jumlah dan jenis alat tangkap serta jumlah nelayan yang lebih besar dan canggih. Data produksi hasil tangkapan pada setiap lokasi dapat ditunjukkan pada tabel 4

Tabel 4. Data produksi hasil tangkapan pada tahun 2006 dan 2007

NO	WILAYAH KECAMATAN	PRODUKSI (Kg)	
		TAHUN 2006	TAHUN 2007
1.	Watulimo	23.603.000	22.332.000
2.	Munjungan	154.750	161.675
3.	Panggul	125.500	95.425
	JUMLAH	23.883.250	22.589.100

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

Data armada perikanan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Data armada perikanan tahun 2006 dan 2007

NO	WILAYAH KECAMATAN	JENIS ARMADA	TAHUN 2006	TAHUN 2007
1.	Watulimo	- Perahu tanpa motor	14	5
		- Perahu motor tempel	312	307
		- Perahu motor dalam	903	908
2.	Munjungan	- Perahu tanpa motor	90	73
		- Perahu motor tempel	479	492
		- Perahu motor dalam	7	7
3.	Panggul	- Perahu tanpa motor	86	69
		- Perahu motor tempel	421	430
		- Perahu motor dalam	-	-
	JUMLAH		2.312	2.291

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

Jumlah alat tangkap tahun 2006 dan 2007 di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Jumlah alat tangkap di Kabupaten Trenggalek

NO	JENIS ALAT TANGKAP	JUMLAH (BUAH)	
		TAHUN 2006	TAHUN 2007
1.	Pukat cincin (Purse seine)	122	119
2.	Gill net / Gill mono Filament	251	294
3.	Pukat pantai (Jaring tarik)	81	81
4.	Jaring klitik (pukat ikan)	1.461	1.434
5.	Tramel net (pukat udang)	122	122
6.	Pancing	1.829	1.610
7.	Payang	44	40
8.	Long line (pancing rawa)	35	35
9.	Lain-lain / pancing tonda	72	72
	JUMLAH	4.017	3.807

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

Jumlah produksi menurut jenis alat tangkap yang digunakan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Jumlah produksi menurut jenis alat tangkap di Kabupaten Trenggalek

NO	JENIS ALAT TANGKAP	PRODUKSI (Kg)	
		TAHUN 2006	TAHUN 2007
1.	Pukat cincin (Purse seine)	19.398.000	19.234.000
2.	Gill net / Gill mono Filament	467.000	321.525
3.	Pukat pantai (Jaring tarik)	200.000	121.000
4.	Jaring klitik (pukat ikan)	132.000	87.575
5.	Tramel net (pukat udang)	-	-
6.	Pancing	1.042.000	510.000
7.	Payang	2.394.000	1.440.000
8.	Long line (pancing rawa)	-	-
9.	Lain-lain / pancing tonda	250.300	875.000
	JUMLAH	23.883.300	22.589.100

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

Adapun jumlah nelayan di Kabupaten Trenggalek tahun 2007 sebagaimana terlihat pada tabel 8.

Tabel 8. Jumlah nelayan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2007

NO	KECAMATAN	JUMLAH NELAYAN
1.	Watulimo	1.292
2.	Munjungan	1.084
3.	Panggul	6.295
	JUMLAH	8.671

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

Dari aspek produksi maka dapat dilaporkan besarnya produksi ikan yang tertangkap pada setiap jenis ikan selama tahun 2006 dan 2007 adalah sebagaimana tabel 9.

Tabel 9. Produksi ikan yang tertangkap pada setiap jenis ikan di Kabupaten Trenggalek

NO	JENIS IKAN	PRODUKSI (Kg)	
		TAHUN 2006	TAHUN 2007
1.	Layang	4.846.000	5.189.000
2.	Kembung	61.000	17.000
3.	Lobster	8.250	8.900
4.	Teri	394.675	19.500
5.	Lemuru	8.048.500	4.502.000
6.	Layur	452.750	724.200
7.	Kwee	12.000	135.000
8.	Petek/ peperek	96.000	30.000
9.	Cucut	141.000	39.000
10.	Tongkol	7.434.800	10.070.850
11.	Julung – julung	-	24.000
12.	Selar	-	80.300
13.	Cakalang	1.327.000	942.000
14.	Tuna	583.000	373.000
15.	Tengiri	10.400	1.600
16.	Slengseng	86.000	156.000
17.	Tetengkek	1000	4.000
18.	Pari	100.000	55.000
19.	Cumi – cumi	-	29.500
20.	Ubur – ubur	-	-
21.	Biji nangka	-	-
22.	Layaran	-	-
23.	Bambangan	-	-
24.	Udang lain	-	8.000
25.	Ekor merah	90.000	51.000
26.	Lain – lain ikan	190.875	126.850
27.	Kakap	-	2.400
28.	Banyar	-	-
	JUMLAH	23.883.250	22.589.100

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terjadi penurunan produksi ikan hasil tangkapan pada tahun 2007 dibandingkan produksi hasil tangkapan tahun 2006 yaitu 5,42 % atau 1.294.150 Kg.
- Jenis ikan yang tertangkap dan mengalami peningkatan jumlah produksi hasil tangkapan tahun 2007 adalah jenis ikan laying, layur, kwee, tongkol, slengseng, pari, cumi – cumi dan lobster. Sedangkan jenis ikan hasil tangkapan yang mengalami penurunan adalah ikan lemuru, cucut, cakalang, tuna dan tengiri.
- Produksi lain – lain sebesar 126.850 Kg adalah gabungan dari berbagai jenis ikan yang jumlahnya/ produksinya kecil sehingga dirasa belum perlu diberi identitas tersendiri.

4.3.2 Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum

Hasil penangkapan ikan di perairan umum dalam tahun 2007 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 4.474 Kg atau 57,66 %.

Hasil tangkapan ikan di perairan umum dapat dilihat pada tabel 10

Tabel 10. Hasil tangkapan ikan di perairan umum tahun 2006 dan 2007

JENIS IKAN	TAHUN 2006		TAHUN 2007	
	PRODUKSI (Kg)	NILAI HARGA (Rp)	PRODUKSI (Kg)	NILAI HARGA (Rp)
Tawes	-	-	-	-
Gabus	-	-	-	-
Lele	2.657	17.799.000	4.430	31.830.500
Udang air	400	4.000.000	-	-
tawar	3.700	28.800.000	7.800	73.000.000
Mujair / Nila	1.000	7.050.000	-	7.050.000
Lain – lain	-	-	-	-
Gurami				
JUMLAH	7.757	57.749.000	12.230	104.830.506

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

4.3.3 Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan

4.3.3.1 Pemasaran Hasil Perikanan

Dari produksi ikan sebesar 23.984.100 Kg tidak semuanya dipasarkan dalam bentuk ikan segar. Ikan sebanyak 6.394 Kg dijual/ dikonsumsi dalam bentuk ikan segar, sedangkan sisanya sebanyak 17.590.000 Kg dijual dalam bentuk ikan olahan.

a. Pemasaran Lokal = 6.387.949

Yang dipasarkan secara lokal terdiri dari :

- Ikan segar sebesar 3.348.194 Kg
- Ikan olahan sebesar 3.039.755 Kg

Pasar lokal yang berada di kecamatan-kecamatan atau di desa-desa di Kabupaten Trenggalek cukup banyak menyerap ikan guna konsumsi lokal, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari luar daerah.

b. Pemasaran keluar daerah = 17.596.151 Kg

Yang dipasarkan keluar daerah terdiri dari :

- Ikan segar 3.045.906 Kg
- Ikan olahan 14.550.245 Kg

Tujuan pasar adalah kota – kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan Bali.

4.3.3.2 Pengolahan Hasil Perikanan

Jenis – jenis ikan yang diolah oleh para pengolah ikan di Kabupaten Trenggalek sebagian besar berasal dari wilayah Kecamatan Watulimo dalam bentuk pindang, kering (asin dan tawar), asap (panggang), dan lain – lain

Data perkembangan produksi ikan hasil olahan di Kabupaten Trenggalek dalam tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 11

Tabel 11 Perkembangan produksi ikan hasil olahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2007

NO	JENIS PENGOLAHAN	JUMLAH		
		PRODUKSI (Kg)	HARGA / Kg	NILAI PRODUKSI (Rp)
1	Pengeringan/ penggaraman	2.525.000	2.100	5.302.500.000
2	Pemindangan	12.847.000	6.700	86.074.900.000
3	Pengasapan	194.000	6.300	1.222.200.000
4	Tepung ikan	2.0324.000	2.000	4.048.000.000
	JUMLAH	17.590.000		96.647.600.000

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

Dari seluruh produksi ikan tahun 2007, jumlah ikan yang diolah dan yang dikonsumsi segar dapat dilihat pada tabel 12

Tabel 12. Data produksi ikan yang diolah dan dikonsumsi segar di Kabupaten Trenggalek tahun 2007

Sumber Ikan	Produksi (Kg)	Segar (Kg)	Diolah (Kg)
Laut	22.589.100	4.999.100	17.590.000
Perairan umum	12.230	12.230	-
Kolam	1.3832.770	1.382.770	-
Air payau	-	-	-
Jumlah	23.984.100	6.394.100	17.590.000

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

Dalam usaha untuk meningkatkan mutu ikan olahan telah dilakukan pembinaan secara kontinyu kepada para pengolah, yang diarahkan untuk peningkatan sanitasi dan hygiene serta kualitas produk olahan. Disamping itu juga telah dilakukan pelatihan – pelatihan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan pengolahan dan pemindangan hasil perikanan.

4.3.4 Budidaya Ikan Air Tawar

Perkembangan usaha budidaya ikan dan jumlah produksinya pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun 2006. Beberapa hal yang menyebabkan berkembangnya cabang usaha budidaya ini yaitu:

- Dampak positif sebagai kegiatan bantuan modal pengembangan budidaya air tawar
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi yang berasal dari protein ikan.
- Makin meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan budidaya ikan air tawar sebagai salah satu alternatif usaha yang menguntungkan.

4.3.4.1 Kolam

Perkembangan lahan budidaya ikan di kolam air tawar dua tahun terakhir antara tahun 2006 dengan tahun 2007 mengalami peningkatan, demikian pula jumlah produksi perikanan budidaya ikan di air tawar (kolam) mengalami peningkatan yang cukup besar. Data perkembangannya dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Perkembangan budidaya ikan di kolam air tawar di Kabupaten Trenggalek tahun 2006 dan 2007

TAHUN	JUMLAH				
	PEMILIK KOLAM (ORANG)	PETANI IKAN (ORANG)	KOLAM (UNIT)	LUAS (Ha)	PRODUKSI (Kg)
2006	860	1.345	1.877	13.37	1.024.634
2007	981	1.540	1.945	13.80	1.382.770

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

Produksi ikan hasil budidaya air tawar pada tahun 2007 mengalami peningkatan dibandingkan produksi tahun 2006 sebesar 358.136 Kg atau 34,95 %.

Data produksi ikan di kolam selama 2 tahun dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Produksi ikan di kolam tahun 2006 dan 2007

JENIS IKAN	TAHUN 2006		TAHUN 2007	
	PRODUKSI (Kg)	NILAI HARGA (Rp)	PRODUKSI (Kg)	NILAI HARGA (Rp)
Bawal	2.000	17.000.000	-	-
Patin	328	3.608.000	-	-
Mujair / nila	6.435	34.762.500	1.000	7.850.000
Lele	995.453	6.990.088.000	1.331.270	9.844.702.000
Gurami	20.418	263.749.000	50.500	656.500.000
JUMLAH	1.024.634	7.309.207.500	1.382.770	10.509.052.000

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

Produksi budidaya air tawar mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 1.024.634 Kg pada tahun 2006 menjadi 1.382.770 Kg pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 358.136 Kg (34,95 %). Hal ini disebabkan adanya minat dan semangat yang besar dari para pembudidaya ikan, fasilitas permodalan dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam bentuk kredit lunak, fasilitas paket – paket budidaya dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten dalam bentuk proyek Anty Proverty Program (APP) dan ditunjang dengan adanya pasar yang kondusif.

4.3.4.2 Pembenihan

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan benih ikan bagi petani ikan di Kabupaten Trenggalek diusahakan antara lain meliputi :

- Balai Benih Ikan (BBI) milik Dinas

Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi Balai Benih Ikan (BBI), selain sebagai tempat pembenihan ikan juga dipakai sebagai tempat uji pembesaran ikan. Produksi benih dari Balai Benih Ikan tahun 2007 sebesar 250.000 ekor, jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2006 yaitu sebesar 59.407 ekor atau 3,63 %.

Produksi Benih BBI Trenggalek tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15 Produksi benih BBI Kabupaten Trenggalek tahun 2007

Jenis Ikan	Jumlah Produksi (ekor)
Nila Gibe	215.750
Tombro	22.500
Koi	1.750
Lele	10.000
Jumlah	250.000

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

- Usaha Pembenihan Ikan Rakyat (UPR)

Produksi ikan dari UPR di Kabupaten Trenggalek dalam tahun 2006 dan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Produksi ikan di UPR di Kabupaten Trenggalek tahun 2006 dan 2007

No	Tahun	Jumlah (ekor)
1.	2006	10.312.000
2.	2007	15.456.000

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

Produksi benih di UPR pada tahun 2007 mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan pada tahun 2006 sebesar 5.144.000 ekor atau 49,88 %.

Produksi benih secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 1.013.489.000 ekor pada tahun 2006 menjadi 10.312.000 ekor pada tahun 2007 atau sebesar 5.114.593 ekor atau 48.57 %.

4.3.5 Budidaya Air Payau

Potensi budidaya tambak di Kabupaten Trenggalek cukup besar kurang lebih 1000 Ha. Perkembangan usaha budidaya tambak pada tahun 2007 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2006. Usaha budidaya tambak berkembang di 3 wilayah kecamatan pantai di Kabupaten Trenggalek yaitu Kecamatan Watulimo, Panggul, dan Munjungan.

Hingga tahun 2007, lahan tambak yang diusahakan mencapai 17,6 Ha dengan perincian di Kecamatan Watulimo seluas 4 Ha, Kecamatan Munjungan seluas 4 Ha dan Kecamatan panggul seluas 9,6 Ha. Produksi budidaya tambak tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Produksi budidaya tambak di Kabupaten Trenggalek

No	Tahun	Produksi (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	2005	2.000	2.000.000	Bandeng
2.	2006	-	-	-

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek, 2008

4.3.6 Budidaya Laut

Sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 sebenarnya telah dilakukan pengembangan usaha budidaya rumput laut baik oleh instansi pemerintah (dana APBD II, APBD I, Proyek Co-Fish), Akademisi (UNIBRAW dengan SMKN 1

Watulimo) maupun swasta (CV.Adhikarsa Carageenan) dengan lokasi budidaya di Perairan Teluk Karanggongso Kecamatan watulimo. Bahkan di Kecamatan Panggul, masyarakat setempat pernah pula membudidayakan rumput laut. Namun pada kenyataannya budidaya rumput laut belum bias berkelanjutan karena kurang ada respon dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena :

1. Minat masyarakat lebih suka ke usaha penangkapan
2. Kesulitan mendapatkan benih
3. Pemasaran hasil panen sulit
4. Faktor keamanan lingkungan

Selanjutnya sejak tahun 2004 mulai dicoba usaha budidaya ikan kerapu dan lobster dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Meskipun produksi benih masih sangat minim terutama disebabkan faktor skill yang kurang. Pada tahun 2005 pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek pernah melakukan kegiatan budidaya ikan kerapu tikus dengan sistem KJA di Pantai Karanggongso Kecamatan Watulimo. Namun kegiatan ini tidak berhasil karena terjadi tindakan pencurian terhadap ikan kerapu yang dibudidayakan di KJA tersebut. Mengingat faktor keamanan yang belum terjamin di wilayah perairan Watulimo, maka pada tahun 2006 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek mencoba melaksanakan kegiatan serupa dengan mengalihkan lokasi kegiatan di pantai Jokerto Desa Nglebeng Kecamatan Panggul.

Sektor budidaya laut di Kabupaten Trenggalek mulai berkembang dengan berdirinya usaha budidaya kerang mutiara, ikan kerapu dan lobster. Jumlah RTP keseluruhan ada 5 RTP yang terbagi 2 RTP budidaya kerang mutiara di Kecamatan Watulimo, budidaya ikan kerapu dan lobster di Kecamatan Watulimo dan 1 RTP budidaya ikan kerapu di Kecamatan Panggul. Budidaya kerang mutiara meliputi pembesaran kerang mutiara oleh CV. GUNUNG UTARA dan pembenihan oleh UD. SETIA LESTARI. Untuk budidaya ikan kerapu dan lobster dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat dengan metode Keramba Jaring Apung.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis *Location Quotient* (LQ) Sektor Perikanan Kabupaten Trenggalek

Analisis yang dapat digunakan untuk melihat potensi daerah adalah *Location Quotient* (LQ). Dalam hal ini yang akan dilihat potensinya adalah sektor perikanan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Menurut Budiharsono (2001) dikatakan bahwa LQ merupakan sebuah indeks untuk mengukur tingkat spesialisasi relatif suatu daerah di dalam suatu aktifitas sektor perikanan tertentu. pengertian relatif dapat diartikan sebagai tingkat spesialisasi yang membandingkan suatu daerah dengan wilayah yang lebih besar dimana daerah yang diamati ini merupakan bagian dari wilayah tersebut.

Keunggulan LQ ini adalah metode LQ ini memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung, serta metode LQ ini metode yang sederhana dan tidak mahal serta dapat diterapkan pada data histogram untuk mengetahui trend. Kelemahan dari metode ini adalah kegagalannya untuk menghitung ketidakseragaman permintaan dan produktifitas nasional secara menyeluruh. Metode ini juga mengabaikan fakta bahwa sebagian produksi nasional adalah untuk orang asing yang tinggal di wilayah tersebut. Adapun perhitungan LQ untuk melihat kontribusi wilayah sektor perikanan terhadap pendapatan Kabupaten Trenggalek dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dimana :

- v_i = Pendapatan Asli Daerah sektor perikanan Kabupaten Trenggalek
- v_t = Pendapatan Asli Daerah seluruh sektor Kabupaten Trenggalek
- V_i = Pendapatan Asli Daerah sektor perikanan Propinsi Jawa Timur
- V_t = Pendapatan Asli Daerah seluruh sektor Propinsi Jawa Timur

Apabila nilai,

$LQ > 1$: maka sektor perikanan tersebut merupakan sektor basis

$LQ < 1$: maka sektor perikanan tersebut merupakan sektor non-basis

Untuk melihat kontribusi wilayah sektor perikanan terhadap pendapatan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat dengan pendekatan metode *Location Quotient* (LQ), yaitu pada tabel 18

Tabel 18. Analisis Location Quotient (LQ) dengan indikator PAD harga yang berlaku

Tahun	vi	vt	Vi	Vt	LQ
2001	511.643.827	23.420.000.000	4.756.887.624	1.310.514.760.000	6.02
2002	498.088.462	20.031.000.000	5.154.964.386	1.797.052.500.000	8.67
2003	765.414.247	37.082.000.000	5.706.503.585	2.196.865.640.000	7.95
2004	930.278.515	36.487.000.000	6.906.002.000	2.860.561.590.000	10.56
2005	748.950.259	28.860.000.000	11.821.236.083,40	3.464.580.020.000	7.61
2006	659.602.295	26.688.229.145	14.331.753.829	4.056.487.642.000	6.99
2007	595.099.323	30.982.000.000	13.617.550.900	3.703.283.580.000	5.22

Sumber : BPS Kabupaen Trenggalek dan BPS Propinsi Jawa Timur, 2008

Berdasarkan perhitungan LQ mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 didapatkan nilai $LQ > 1$, maka sektor perikanan di Kabupaten Trenggalek merupakan kegiatan basis ekonomi atau dengan kata lain sektor perikanan di Kabupaten Trenggalek merupakan sektor basis dalam kegiatan ekonomi di Propinsi Jawa Timur.

Menurut penelitian Aprilia, 2007. yang berjudul Peranan Pelabuhan Perikanan Prigi Dalam mendukung Pembangunan Sektor Perikanan Di Kabupaten Trenggalek di sebutkan bahwa apabila dilihat dari potensi yang ada maka sudah seharusnya sektor perikanan Kabupaten Trenggalek merupakan sektor basis di Propinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana perikanan sudah cukup tersedia, wilayah teluk Prigi dekat dengan daerah penangkapan rawai tuna di Samudra Indonesia dan juga pantai prigi merupakan pangkalan kapal-kapal rawai tuna Benoa Bali, sehingga mempunyai prospek yang baik dalam aktifitas perikanan laut baik itu secara ekonomi maupun sosial.

5.2 Optimalisasi Sektor Perikanan Dalam Meningkatkan PAD

Dalam penelitian ini yang dioptimalkan adalah sumberdaya perikanan yang ada di Kabupaten Trenggalek yang meliputi bahan baku (armada penangkapan dan alat tangkap), tenaga kerja dan modal. Sedangkan tujuan dari pengoptimalan adalah untuk meningkatkan pendapatan sektor perikanan dari hasil penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, budidaya air tawar dan tambak serta pengolahan hasil perikanan yang mana nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Trenggalek.

5.2.1 Model Optimasi

5.2.1.1 Kapasitas Sumberdaya

A. Kapasitas armada penangkapan ikan di laut

Armada penangkapan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di laut di mana jenis armada yang ada di Kabupaten Trenggalek terdiri dari perahu tanpa motor berjumlah 147 buah, perahu motor tempel 1.229 buah, dan perahu motor dalam 915 buah, atau seperti yang ada dalam tabel 19.

Tabel 19. Kapasitas armada penangkapan ikan di laut pada tahun 2007

No	Jenis Armada	Jumlah (buah)
1.	Perahu tanpa motor	147
2.	Perahu motor tempel	1.229
3.	Perahu motor dalam	915
Jumlah		2.291

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek 2008

B. Kapasitas Alat Tangkap (penangkapan Ikan di Laut)

Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan di laut yang ada di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2007 berjumlah 3.807. adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20. Perkembangan alat tangkap (penangkapan ikan di laut) pada tahun 2007

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah (buah)
1.	Pukat cincin (purse seine)	119
2.	Gillnet/Gillnet Monofilamen	294
3.	Pukat pantai (jaring tarik)	81
4.	Jaring klitik	1.434
5.	Tramel net (pukat udang)	122
6.	Pancing ulur	1.610
7.	Payang	40
8.	Pancing Rawai (Long Lines)	35
9.	Pancing tonda	72
Jumlah		3.807

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek 2008

C. Kapasitas Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah salah satu sumberdaya atau faktor produksi yang penting dalam pelaksanaan aktifitas penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, budidaya serta pengolahan hasil perikanan, dimana tenaga kerja merupakan motor atau penggerak dan pelaksana untuk memanfaatkan sumberdaya. Kapasitas tenaga kerja yang dihitung terdiri dari angkatan kerja dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2007 yaitu sejumlah 189.807 orang.

D. Kapasitas Anggaran

Kapasitas anggaran yang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan dapat dilihat dari alokasi biaya anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Trenggalek pada tahun 2007 sebesar Rp 3.912.508.100 dengan rincian pada tabel 21

Tabel 21. Rincian Alokasi Dana Pembangunan Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2007

No	Nama kegiatan	Dana (Rp)
1.	Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	40.000.000
2.	Pelatihan ketrampilan penangkapan ikan lepas pantai	45.000.000
3.	Pengelolaan perairan umum	60.000.000
4.	Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI)	50.000.000
5.	Penanggulangan lingkungan dan penyakit ikan	25.000.000
6.	Penguatan modal masyarakat pembudidaya ikan	200.000.000
7.	Pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA)	50.000.000
8.	Pengembangan sentra pasar ikan	50.000.000
9.	Peningkatan pelayanan perijinan usaha kelautan dan perikanan	25.000.000
10.	Pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan	2.722.328.100
11.	Monitoring peredaran hasil perikanan	25.000.000
12.	Operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	50.000.000
13.	Pembinaan kelembagaan masyarakat nelayan	25.000.000
14.	Pelatihan siswasmas	25.000.000
15.	Pendampingan program PEMP	350.000.000
16.	Operasional kapal patroli pengaman pantai	25.000.000
17.	Pengembangan system informasi kelautan dan perikanan	65.000.000
18.	Rehabilitasi hutan bakau	50.000.000
19.	Pengelolaan keuangan dan barang satuan kerja	30.180.000
Jumlah		3.912.508.100

Sumber : DKP Kabupaten Trenggalek 2008

5.2.1.2 Koefisien (Kebutuhan) Sumberdaya

A. Armada Penangkapan Ikan

Koefisien armada penangkapan ikan di laut adalah jumlah perahu yang digunakan untuk menangkap ikan dalam 1 km² luas daerah penangkapan. Luas

daerah penangkapan ikan di Kabupaten Trenggalek sebesar 20 % dari Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 35.558 km² yaitu 7.112 km² dan jumlah armada yang ada di Kabupaten Trenggalek sebanyak 2.291 buah. Jadi koefisien dari armada penangkapan ikan di laut diperoleh dari luas daerah penangkapan dibagi jumlah perahu yang tersedia di Kabupaten Trenggalek sebesar 3,10 buah/ km²

B. Alat Tangkap Penangkapan Ikan di Laut

Koefisien alat tangkap adalah alat tangkap yang ada dalam 1 armada yang digunakan untuk menangkap ikan setiap 1 km² luas daerah penangkapan. Jumlah armada yang ada sebesar 2.291 buah sedangkan luasan daerah penangkapan seluas 7.112 km² dan dalam 1 armada di asumsikan ada 3 buah alat tangkap. Jadi koefisien dari alat tangkap penangkapan ikan di laut diperoleh dari kepadatan perahu dikalikan dengan jumlah alat tangkap/ perahu yaitu sebesar 9,31 buah/ km².

C. Tenaga Kerja

Koefisien tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan tiap aktivitas. Untuk tenaga kerja di bidang penangkapan ikan di laut, perairan umum, dan budidaya adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan setiap 1 luasan daerah penangkapan dan budidaya sedangkan tenaga kerja untuk pengolahan hasil perikanan adalah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menghasilkan setiap 1 ton produksi. Luas daerah penangkapan ikan di laut seluas 7.112 km², jumlah nelayan 8.671 orang, jadi koefisiennya 8.671 orang dibagi 7.112 km² hasilnya 1,22 orang/km². Luas daerah penangkapan ikan di perairan umum seluas 5 ha, jumlah orang yang bekerja di perairan umum sebanyak 360 orang jadi koefisiennya 360 orang dibagi 5 ha hasilnya 72 orang/ha. Luas lahan untuk budidaya air tawar dan tambak seluas 72 ha, jumlah pembudidaya ikan sebanyak 1.540 orang, jadi koefisiennya 1.540 orang dibagi 72 ha hasilnya 21.39 orang/ha. Untuk produksi yang dihasilkan dalam 1 tahun

pengolahan ikan sebesar 9.925 ton dengan jumlah pengolah ikan sebanyak 975 orang, jadi koefisiennya 9.925 ton dibagi 975 orang hasilnya 10,18 orang/ton. Untuk lebih jelasnya perhitungan koefisien dari tenaga kerja dapat di lihat pada tabel 22.

Tabel 22. Kebutuhan Tenaga Kerja untuk aktifitas penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan.

No	Kendala	Aktivitas			
		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
1.	Tenaga kerja	1,22	72	21,39	10.18
	Satuan	Orang/km ²	Orang/ha	Orang/ha	Orang/ton

D. Anggaran

Koefisien anggaran adalah anggaran yang digunakan untuk proses produksi selama 1 tahun yang diperoleh dari anggaran APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2007. Dana yang dialokasikan yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan ikan di laut sebesar Rp.992.442.700. Jadi koefisiennya diperoleh dari modal Rp 992.442.700 dibagi luas daerah penangkapan seluas 7.112 km². Dana yang dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan ikan di perairan umum Rp 60.000.000 jadi koefisiennya diperoleh dari modal sebesar Rp 60.000.000 dibagi luas daerah penangkapan ikan di perairan umum seluas 5 ha. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan dengan budidaya air tawar dan tambak sebesar Rp 1.157.442.700. Jadi koefisiennya diperoleh dari modal sebesar Rp 1.157.442.700 dibagi luas lahan budidaya seluas 72 ha. Dana yang dialokasikan untuk pengolahan hasil perikanan sebesar Rp. 982.442.700. Jadi koefisiennya diperoleh dari modal produksi yang dipakai dalam 1 tahun produksi sebanyak Rp. 982.442.700 dibagi 9.925 ton. Untuk hasilnya dapat dilihat dalam tabel 23.

Tabel 23. Koefisien Anggaran Yang Digunakan Untuk Aktivitas penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.

No	Kendala	Aktivitas			
		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
1.	Anggaran	139.544,8116	12.000.000	16.075.593,05	98.986,67
	Satuan	Rp/km ² /thn	Rp/ha/thn	Rp/ha/thn	Rp/ton/thn

5.2.1.3 Koefisien Fungsi Tujuan (Pendapatan)

Pendapatan dari sektor perikanan di Kabupaten Trenggalek berasal dari aktivitas penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, budidaya air tawar dan tambak serta pengolahan dari hasil perikanan. Pendapatan dari penangkapan ikan di laut sebesar Rp 69.478.093.570 pertahun. Koefisiennya diperoleh dari pendapatan yang dihasilkan dalam pertahun dibagi dengan luas daerah penangkapan yaitu Rp 69.478.093.570 dibagi luas daerah penangkapan 7.112 km² hasilnya 9,77 jutaRp/km²/tahun. Pendapatan yang diperoleh dari penangkapan ikan di perairan umum sebesar Rp 83.489.357. Koefisiennya diperoleh dari pendapatan yang dihasilkan dalam satu tahun yaitu Rp 83.489.357 dibagi luas daerah penangkapan 5 ha hasilnya 15,90 jutaRp/ha/tahun. Pendapatan dari aktifitas budidaya sebesar Rp 4.954.485.214. Koefisiennya diperoleh dari pendapatan yaitu Rp 4.954.485.214 dibagi luas daerah budidaya yaitu seluas 72 ha hasilnya 68,84 jutaRp/ha/tahun. Pendapatan dari pengolahan hasil perikanan sebesar Rp 44.901.077.490. Koefisiennya diperoleh dari pendapatan yaitu Rp 44.901.077.490 dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan sebesar 9.925.007 ton hasilnya 4,52 jutaRp/ton/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24. Koefisien pendapatan yang diperoleh dari aktivitas perikanan

No	Kendala	Aktivitas			
		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
1.	Pendapatan	9,77	15,90	68,84	4,52
	Satuan	jutaRp/km ² /thn	jutaRp/ha/thn	jutaRp/ha/thn	jutaRp/ton/thn

Keterangan :

- X_1 = Aktivitas Penangkapan Ikan di Laut
 X_2 = Aktivitas Penangkapan Ikan di Perairan Umum
 X_3 = Aktivitas Budidaya Air Tawar dan Tambak
 X_4 = Aktivitas Pengolahan Hasil Perikanan

5.2.2 Rumusan Model Linear Programming

Koefisien input dan output apabila sudah diketahui maka dapat disusun fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Fungsi tujuan dalam model linear programming yang disusun adalah memaksimalkan pendapatan dari aktivitas penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan di perairan umum, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan selama satu tahun. Rumusan fungsi tujuan adalah sebagai berikut :

$$Z \text{ max} = 9,77 X_1 + 15,90 X_2 + 68,84 X_3 + 4,52 X_4$$

Fungsi kendala armada penangkapan ikan di laut dapat disusun sebagai berikut :

$$3,10 X_1 \leq 2291$$

Fungsi kendala alat tangkap penangkapan ikan di laut dapat disusun sebagai berikut :

$$9,31 X_1 \leq 3807$$

Fungsi kendala tenaga kerja dapat disusun sebagai berikut :

$$1,22 X_1 + 72 X_2 + 21,39 X_3 + 10,18 X_4 \leq 189.807$$

Fungsi kendala modal dapat disusun sebagai berikut :

$$139.544,812 X_1 + 12.000.000 X_2 + 16.075.593,06 X_3 + 98.986,67 X_4 \leq 3.912.508.100$$

Apabila fungsi tujuan dan faktor kendala telah ditentukan, maka dapat disusun tabel simplek seperti yang terdapat pada tabel 25.

Tabel 25. Tabel Simplek Perikanan Yang Ada Di Kabupaten Trenggalek

No	Sumberdaya	Aktivitas				Batas Sumberdaya
		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	
1.	Armada	3,10	0	0	0	2.291
2.	Alat Tangkap	9,31	0	0	0	3.807
3.	Tenaga Kerja	1,22	72	21,39	10,18	189.807
4.	Modal	139.544,812	12.000.000	16.075.593,06	98.986,67	3.912.508.100
Pendapatan		9,77	15,90	68,84	4,52	

5.2.3 Peningkatan PAD sebelum dan sesudah optimalisasi

Pendapatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendapatan dari sektor perikanan, khususnya dari subsektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, perikanan perairan umum, dan pengolahan hasil perikanan. Dimana pendapatan ini akan berpengaruh terhadap PAD

Peningkatan pendapatan dapat diperhitungkan dengan membandingkan nilai antara pendapatan yang dihasilkan dari optimalisasi dengan pendapatan aktual. Oleh karena itu perlu diketahui :

1. Pendapatan yang ada sekarang (aktual)
2. Pendapatan yang maksimal berdasarkan dari hasil optimalisasi LP.

a. Pendapatan yang ada sekarang (aktual)

Pendapatan yang ada sekarang dilihat dari PAD yang ada di Kabupaten Trenggalek yaitu pada tahun 2007 sebesar Rp 30.982.000.000

b. Pendapatan yang maksimal berdasarkan dari hasil optimalisasi LP.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program POM for windows diperoleh pendapatan optimal (**Objective Function Value**) sebesar Rp 95.584,03 juta. Pendapatan ini diperoleh apabila penangkapan ikan di laut dapat dilakukan pada daerah seluas 408,9151 km² per tahun daerah penangkapan. Budidaya dilakukan pada lahan seluas 126,9682 ha per tahun. Pengolahan hasil perikanan dapat menghasilkan sebanyak 18.329,3 ton per tahun. Sedangkan penangkapan ikan di perairan umum tidak perlu dilakukan. Rincian data tentang alokasi (penggunaan) sumberdaya optimal dapat dilihat pada tabel 26.

Tabel 26. Solusi Alokasi (penggunaan) Sumberdaya Optimal

No	Uraian	Penggunaan sumberdaya	Solusi Penggunaan sumberdaya optimal
1	Penangkapan di laut	7,112 km ²	408,9151 km ²
2	Penangkapan di perairan umum		0
3	Budidaya	72 ha	126,9682 ha
4	Pengolahan hasil perikanan	9.925 ton	18.329,3 ton

c. Peningkatan Pendapatan

Perhitungan peningkatan pendapatan dilaksanakan dengan mengurangi pendapatan optimal dari pendapatan aktual. Apabila sumberdaya perikanan yang ada pada wilayah penelitian dimanfaatkan sesuai dengan solusi optimal maka akan terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan, yaitu terjadi peningkatan sebesar Rp. 64.602.030.000 (meningkat 208,51 %). Peningkatan tersebut relatif sangat tinggi. Hal ini dapat difahami karena sumberdaya perikanan yang ada di kabupaten trenggalek belum dimanfaatkan keseluruhannya secara optimal.

Oleh karena itu seharusnya mulai difikirkan bagaimana sektor perikanan yang ada di daerah penelitian ini diusahakan untuk lebih meningkatkan pendapatan dibidang penangkapan di laut, budidaya serta pengolahan hasil perikanan, agar dapat meningkatkan pendapatan di wilayah tersebut. Peningkatan pendapatan regional atas alokasi sumberdaya tambak optimal terlihat pada tabel 27

Tabel 27. Peningkatan Pendapatan Atas Alokasi Sumberdaya Optimal

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pendapatan optimal	95.584.030.000
2.	Pendapatan aktual	30.982.000.000
	Peningkatan pendapatan	64.602.030.000

5.2.4. Analisis *Reduced Cost*

Reduced Cost akan bernilai nol jika nilai variabel putusan positif (kendala aktif), dan *reduced cost* akan menjadi positif kalau nilai variabel putusan adalah nol (kendala tidak aktif). *Reduced cost* ini memberikan gambaran penurunan nilai *obyective function* bila sumberdaya tidak aktif ditingkatkan penggunaannya sebesar satu satuan.

Nilai fungsi tujuan yang ada menunjukkan bahwa nilainya akan maksimum pada Rp. 95.584.030.000,- bila nilai variabel putusan positif dan reduced costnya nol seperti terlihat pada tabel 28. Sedangkan nilai variabel yang tidak dianjurkan menjadi putusan nilai variabel putusan nol dan reduced costnya positif, seperti terlihat pada tabel 29.

Tabel 28. Nilai variabel putusan dan reduced cost

No	Variabel fungsi tujuan	Nilai variabel putusan	Reduced cost
1	Penangkapan di laut	408,9151	0
2	Budidaya	126,9682	0
3	Pengolahan hasil perikanan	18.329,3	0

Data pada tabel 27 menunjukkan nilai turunnya nilai *objective function* bila sumberdaya tidak aktif dipaksakan ditingkatkan penggunaannya sebesar satu-satuan.

Tabel 29. Nilai variabel yang tidak dianjurkan menjadi putusan dan reduced costnya

No	Variabel fungsi tujuan	Nilai variabel putusan	Reduced cost
1	Penangkapan di perairan umum	0	58,3286

5.2.5 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dapat digunakan untuk mengkaji kepekaan nilai program optimal bilamana terjadi perubahan dalam koefisien aktivitas maupun penyediaan sumberdaya. Perubahan-perubahan tersebut dapat disebabkan adanya perubahan harga, baik pada output atau pada sumberdaya yang digunakan.

Pada analisis sensitivitas terdapat kisaran nilai koefisien aktivitas dan sumberdaya. Nilai kisaran tersebut menunjukkan kepekaan (*sensitivity*) nilai program optimal, artinya selama perubahan nilai koefisien aktivitas dan ketersediaan sumberdaya berada dalam batas kisaran, maka setiap usaha yang bertujuan menambah satu satuan aktivitas maupun sumberdaya tidak akan merubah kondisi nilai program optimal. Kisaran kepekaan setiap aktivitas tersebut ditunjukkan oleh penyelesaian *sensitivity report*.

Kisaran per satuan aktivitas pada solusi optimal yaitu untuk aktivitas X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , memiliki kisaran kepekaan dengan batas minimum dan batas maksimum tertentu yang ditunjukkan oleh nilai *Lower Limit* (Minimum) dan *Upper Limit* (Maksimum), nilainya terlihat pada tabel 30.

Tabel 30. Nilai Kisaran Kepekaan Koefisien Aktivitas Fungsi Tujuan

Aktivitas	Current Coefficient	Lower Limit (Minimum)	Upper Limit (Maksimum)
X_1	9,77	9,77	9,77
X_2	15,9	-Infinity	74,2286
X_3	68,84	-13,0666	734,0551
X_4	4,52	0,4239	89,5326

Kisaran kepekaan kendala (RHS) dengan batas minimum dan batas maksimum tertentu ditunjukkan oleh nilai *lower limit* dan *upper limit* seperti terlihat pada tabel 31.

Tabel 31. Nilai Kisaran Kepekaan Kendala (RHS)

Row	Current RHS	Lower Limit (Minimum)	Upper Limit (Maksimum)
Alat tangkap	3,807	-0,0002	6.880,391
Armada	2,291	1.267,637	Infinity
Tenaga kerja	189,807	5.628,875	397.001,1
modal	3.912.508.00 0	-Infinity	Infinity

Pada kondisi ini jumlah alat tangkap yang harus digunakan sebanyak 0,9399 dari kapasitas alat tangkap yang ada di Kabupaten Trenggalek 3.807 buah. Jumlah armada yang tidak terpakai sebanyak 1.023,363 buah dari jumlah armada yang ada sebanyak 2.291 buah. Jumlah tenaga kerja yang terpakai sebanyak 0,4076 orang dari kapasitas tenaga kerja yang ada sebanyak 189.807 orang dan modal harus terpakai semuanya tanpa adanya sisa. Alat tangkap yang mula-mula sebanyak 3.807 buah dapat dikurangi menjadi minimal -0,0002 dan dapat ditambah menjadi maksimal sebanyak 6.880,391 buah agar pendapatan optimal. Jumlah armada yang mula-mula sebanyak 2.291 dapat dikurangi minimal 1.267,637 buah dan dapat ditambah sebanyak-banyaknya agar optimal. Tenaga kerja yang mula-mula berjumlah 189.807 orang dapat dikurangi minimal 5.628,875 dan dapat ditambah

maksimal sebanyak 397.001,1 orang. Modal modal yang mula-mula berjumlah 3.912.508.000 dapat dikurangi seminimal-minimalnya dan dapat di tambahkan sebanyak-banyaknya. Untuk lebih jelasnya dari hasil analisis POM for windows dapat dilihat pada lampiran 2.

Penyerapan faktor-faktor produksi alat tangkap, jumlah armada, tenaga kerja dan modal selama satu tahun dapat dilihat pada tabel 32.

Tabel 32. Penyerapan faktor-faktor produksi alat tangkap, jumlah armada, tenaga kerja dan modal selama satu tahun

Faktor Produksi	Tersedia	Terpakai	Sisa	Keterangan
Alat tangkap	3.807	3.807	0	Efisien
Armada	2.291	1.267,637	1.023,363	Tidak Efisien
Tenaga kerja	18.807	18.807	0	Efisien
Modal	3.912.508.000	3.912.508.000	0	

Jumlah PAD sebelum dioptimalkan sebesar Rp 30.982.000.000 dan setelah dilakukan optimalisasi dengan analisis linear programming besarnya dapat meningkat menjadi Rp 95.584.030.000, jadi ada peningkatan sebesar 208 %. Melihat peningkatan pendapatan sektor perikanan yang melebihi dua kali lipatnya dari jumlah PAD yang ada di Kabupaten Trenggalek, maka sudah seharusnya sektor perikanan memberikan kontribusi yang nyata terhadap PAD Kabupaten Trenggalek.

5.2 Alternatif Kebijakan Yang Diterapkan Berkaitan Dengan Sumberdaya Perikanan Dalam Rangka Peningkatan PAD Kabupaten Trenggalek

Hubungan PAD dengan penyelenggaraan pembangunan praktis tidak bisa dipisahkan. Apabila dukungan dananya tidak terencana dengan baik, maka penyelenggaraan pembangunan akan menemui jalan buntu. Sumber dari penerimaan PAD berasal dari beberapa sektor yang salah satunya berasal dari sektor perikanan.

PAD sektor perikanan Di Kabupaten Trenggalek berasal dari :

1. Sewa rumah dinas
2. Retribusi pelelangan ikan
3. Ijin usaha perikanan
4. Penerimaan bunga kredit sub sektor perikanan
5. Penerimaan angsuran pokok sub sektor perikanan

Apabila ditinjau dari potensi sektor perikanan dan kelautan yang cukup besar di Kabupaten Trenggalek dan dari hasil analisis Linear programming yang menunjukkan pendapatan optimal melebihi jumlah PAD, seharusnya sektor perikanan dapat memberikan kontribusi yang dominan dan optimal terhadap nilai PAD dan dapat dijadikan salah satu sektor utama penyokong perekonomian daerah. Tetapi kenyataannya kontribusi sektor perikanan pada PAD relatif kecil. Hal ini bisa dijadikan sebagai alternatif kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek, mengenai bagaimana meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD dengan melihat banyaknya potensi perikanan yang ada, mengingat Kabupaten Trenggalek merupakan daerah basis ekonomi sektor perikanan Propinsi Jawa Timur. Disamping itu potensi perikanan yang ada bisa membawa dampak yang lebih baik pada perekonomian masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi yang ada maka akan muncul usaha-usaha baru yang nantinya selain bisa meningkatkan kontribusi pada PAD juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Di Kabupaten Trenggalek PAD masih relatif kecil dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah sebesar 5 % dan dalam pembentukan PDRBnya masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 34,83 % (BPS Kabupaten Trenggalek, 2007). Menurut Ambardi dan Prabawantoro (2002), dikatakan bahwa upaya pengoptimalan penerimaan PAD dapat juga berarti mengupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari semua sektor PAD agar penerimaannya melampaui atau mendekati target yang telah ditetapkan berdasarkan pengkajian potensinya.

Masih rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PAD di Kabupaten Trenggalek disebabkan antara lain :

1. Keberadaan retribusi seringkali membuat masyarakat enggan untuk memenuhi kewajibannya. Karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya retribusi. Selain itu tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar retribusi.
2. Keterbatasan pemilik modal, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan terbatasnya SDM nelayan mengakibatkan potensi sumberdaya perikanan laut dalam (lepas Pantai) dan perikanan tambak belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Belum adanya petugas penyuluh/ tenaga fungsional pada masing-masing kecamatan, menyebabkan kurang optimalnya pembinaan terhadap masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
4. Masih tingginya *fish losses* di TPI Prigi menyebabkan data produksi penangkapan ikan kurang faktual dan perolehan PAD dari retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan belum seimbang jika di bandingkan dengan fasilitas yang telah di bangun oleh pemerintah. (Laporan Tahunan DKP Kabupaten Trenggalek, 2007)
5. Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang belum dioptimalkan secara sempurna. Seharusnya penangkapan ikan di laut dapat dilakukan pada daerah seluas 408,9151 km² per tahun sedangkan faktanya hanya dilakukan pada daerah penangkapan seluas 7,112 km². Budidaya yang seharusnya dapat dioptimalkan dengan lahan seluas 126,9682 ha per tahun, faktanya hanya dilakukan pada lahan seluas 72 ha. Pada pengolahan hasil perikanan seharusnya dapat menghasilkan 18.329,3 ton per tahun tetapi faktanya hanya dapat menghasilkan 9.925 ton saja.

Dengan adanya permasalahan tersebut, pihak pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan berusaha untuk

meningkatkan PAD dengan melaksanakan beberapa usaha. Peningkatan PAD dapat ditempuh dengan peningkatan kemampuan aparat, tertib organisasi dan administrasi, tertib peraturan perundangan.

Menurut Ambardi dan Pribawantoro (2002), intensifikasi PAD dilakukan untuk mengefektifkan pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah dan mengefisienkan cara pemungutannya dengan memperhatikan objek dan subjek pungutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka intensifikasi misalnya dengan melakukan perhitungan potensi penerimaan, meningkatkan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat didalam membayar pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pengawasan dan adanya peningkatan pelayanan pajak atau menyederhanakan proses pembayarannya. Usaha-usaha secara intensif yang dilakukan dalam usaha peningkatan nilai kontribusi sektor perikanan terhadap PAD antara lain :

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah kepada Masyarakat
2. Menambah tenaga dilapangan sehingga dapat memonitoring kegiatan pelayanan retribusi
3. Melakukan kegiatan usaha perikanan dengan memanfaatkan potensi perikanan yang ada.

Selain adanya usaha secara intensif, usaha peningkatan PAD juga dilakukan secara ekstensif. Menurut Ambardi dan Prawantoro (2002), dikatakan bahwa ekstensifikasi PAD dilakukan dengan cara menjaring wajib pajak/ retribusi yang baru dengan mengenakan jenis pajak daerah atau retribusi daerah dimana pajak daerah yang dikenakan harus memiliki dayaguna ekonomi dan penggunaan sumberdaya. Usaha-usaha ekstensifikasi yang dilakukan sebagai usaha peningkatan nilai kontribusi sektor perikanan terhadap PAD meliputi :

1. Mengembangkan sarana dan prasarana Pelabuhan laut, Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan

2. Pengembangan kawasan *Fishery Park*. Dengan pengembangan sarana seperti pelabuhan, kapal penangkapan ikan, industri pengolahan hingga pemasaran.
3. Mengembangkan Kawasan Pengembangan Utama Komoditi (KAPUK) dan sentra Pengembangan Perikanan. Mengingat peluang pasar untuk ikan laut dan tawar sangat besar.

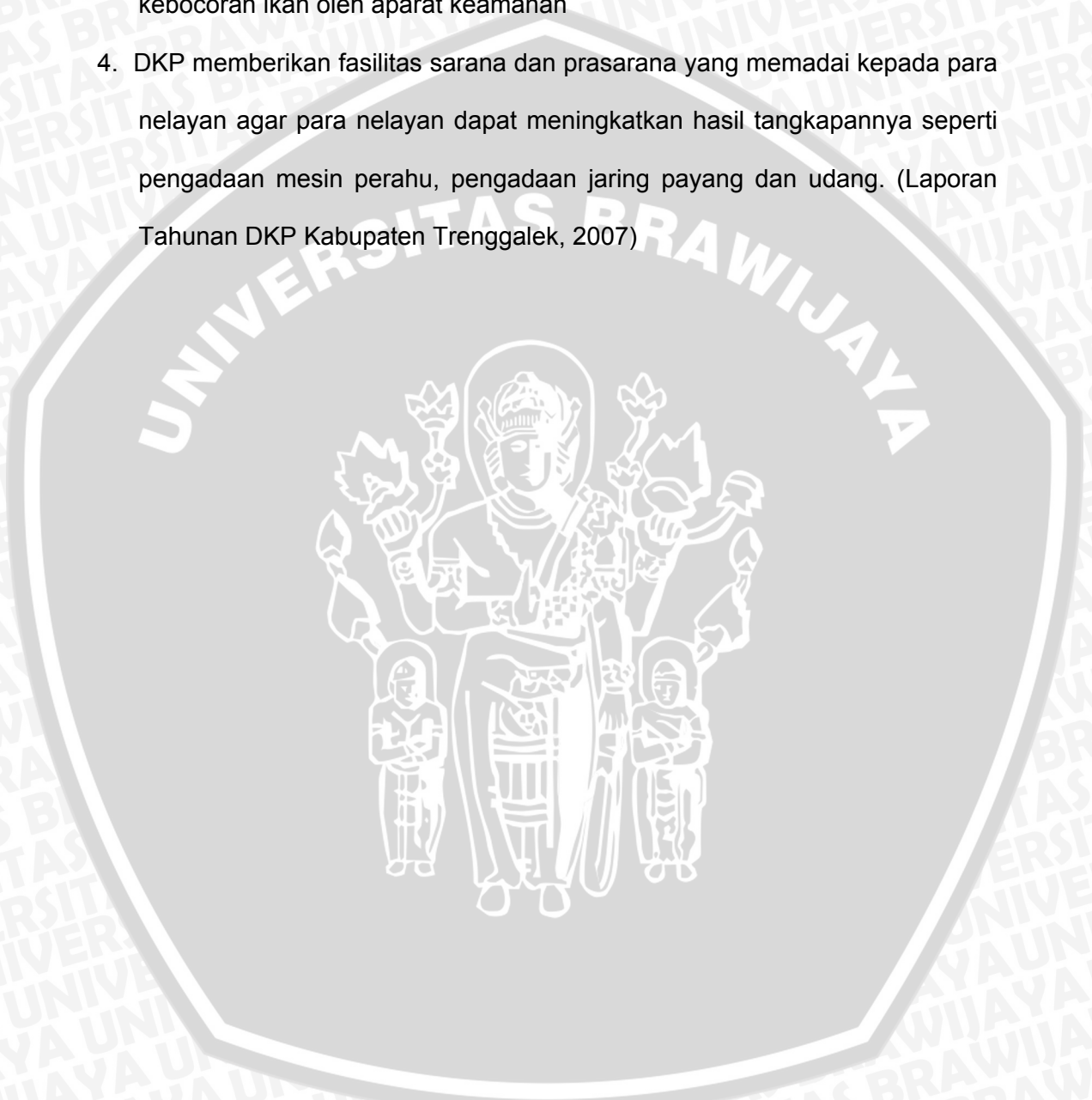
Dengan mengembangkan usaha-usaha tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan sektor perikanan dan kelautan sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan pendapatan sektor perikanan yang maksimal nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana sektor perikanan dan diharapkan bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat khususnya yang bergerak pada sektor perikanan.

Karena adanya faktor-faktor kendala diatas, maka sehubungan dengan kendala tersebut seharusnya Pemerintah Daerah bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek dapat melakukan usaha sebagai alternatif kebijakan seperti :

1. Menugaskan staf/ karyawan dinas di lapang untuk meninjau masyarakat yang mempunyai usaha perikanan yang sudah memenuhi standart usaha dan memberikan penyuluhan agar mereka mengurus Surat Ijin Usaha Perikanan. Apabila mereka sudah mempunyai Surat Ijin Usaha maka dapat dikenakan retribusi, dimana retribusi tersebut dapat menambah kontribusi terhadap PAD.
2. Dinas Perikanan dan Kelautan harus bisa melaksanakan proyek-proyek subsektor perikanan seperti melakukan usaha untuk memperkuat permodalan para nelayan dan pembudidaya ikan dengan cara memberikan bantuan modal melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan kegiatan Penguatan Modal Masyarakat Pembudidaya Ikan, pengembangan budidaya air tawar dengan membentuk UPR (Unit

Pembebenihan Rakyat) agar dari penerimaannya dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD di Kabupaten Trenggalek.

3. Setiap tahun optimalisasi TPI di Kecamatan Watulimo dan Munjungan harus selalu ditingkatkan berkaitan dengan penertiban untuk meminimalkan kebocoran ikan oleh aparat keamanan
4. DKP memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai kepada para nelayan agar para nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapannya seperti pengadaan mesin perahu, pengadaan jaring payang dan udang. (Laporan Tahunan DKP Kabupaten Trenggalek, 2007)



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis *Location Quotient* diperoleh nilai LQ pada tahun 2001 sebesar 6.02, tahun 2002 sebesar 8.67, tahun 2003 sebesar 7.95, tahun 2004 sebesar 10.56, tahun 2005 sebesar 7.61, tahun 2006 sebesar 6.99, tahun 2007 sebesar 5.22. Mulai tahun 2001 sampai dengan 2007 diperoleh nilai $LQ > 1$, maka sektor perikanan Kabupaten Trenggalek merupakan sektor basis di dalam kegiatan ekonomi di Propinsi Jawa Timur.
2. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program POM for windows diperoleh pendapatan optimal sebesar Rp 95.584,03 juta. Pendapatan ini diperoleh apabila penangkapan ikan di laut dapat dilakukan pada daerah seluas 408,9151 km² per tahun daerah penangkapan. Budidaya dilakukan pada lahan seluas 126,9682 ha per tahun. Pengolahan hasil perikanan dapat menghasilkan sebanyak 18.329,3 ton per tahun. Sedangkan penangkapan ikan di perairan umum tidak perlu dilakukan. Peningkatan pendapatan dilaksanakan dengan mengurangi pendapatan optimal dari pendapatan aktual. Apabila sumberdaya perikanan yang ada pada wilayah penelitian dimanfaatkan sesuai dengan solusi optimal maka akan terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan, yaitu terjadi peningkatan sebesar Rp. 64.602.030.000 (meningkat 208,51 %).
3. Faktor-faktor penyebab masih rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PAD di Kabupaten Trenggalek disebabkan antara lain :
 1. Keberadaan retribusi seringkali membuat masyarakat enggan untuk memenuhi kewajibannya. Karena kurangnya pemahaman masyarakat

akan pentingnya retribusi. Selain itu tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar retribusi.

2. Keterbatasan pemilik modal, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan terbatasnya SDM nelayan mengakibatkan potensi sumberdaya perikanan laut dalam (lepas Pantai) dan perikanan tambak belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
 3. Belum adanya petugas penyuluh/ tenaga fungsional pada masing-masing kecamatan, menyebabkan kurang optimalnya pembinaan terhadap masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
 4. Masih tingginya *fish losses* di TPI Prigi menyebabkan data produksi penangkapan ikan kurang faktual dan perolehan PAD dari retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan belum seimbang jika dibandingkan dengan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah.
 5. Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang belum dioptimalkan secara sempurna. Seharusnya penangkapan ikan di laut dapat dilakukan pada daerah seluas 408,9151 km² per tahun sedangkan faktanya hanya dilakukan pada daerah penangkapan seluas 7,112 km². Budidaya yang seharusnya dapat dioptimalkan dengan lahan seluas 126,9682 ha per tahun, faktanya hanya dilakukan pada lahan seluas 72 ha. Pada pengolahan hasil perikanan seharusnya dapat menghasilkan 18.329,3 ton per tahun tetapi faktanya hanya dapat menghasilkan 9.925 ton saja.
4. Karena adanya faktor-faktor kendala diatas, maka sehubungan dengan kendala tersebut seharusnya Pemerintah Daerah bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek dapat melakukan usaha sebagai alternatif kebijakan seperti :
1. Menugaskan staf/ karyawan dinas di lapang untuk meninjau masyarakat yang mempunyai usaha perikanan yang sudah memenuhi

standart usaha dan memberikan penyuluhan agar mereka mengurus Surat Ijin Usaha Perikanan. Apabila mereka sudah mempunyai Surat Ijin Usaha maka dapat dikenakan retribusi, dimana retribusi tersebut dapat menambah kontribusi terhadap PAD.

2. Dinas Perikanan dan Kelautan harus bisa melaksanakan proyek-proyek subsektor perikanan seperti melakukan usaha untuk memperkuat permodalan para nelayan dan pembudidaya ikan dengan cara memberikan bantuan modal melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan kegiatan Penguatan Modal Masyarakat Pembudidaya Ikan, pengembangan budidaya air tawar dengan membentuk UPR (Unit Pembenihan Rakyat) agar dari penerimaannya dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD di Kabupaten Trenggalek.
3. Setiap tahun optimalisasi TPI di Kecamatan Watulimo dan Munjungan harus selalu ditingkatkan berkaitan dengan penertiban untuk meminimalkan kebocoran ikan oleh aparat keamanan
4. DKP memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai kepada para nelayan agar para nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapannya seperti pengadaan mesin perahu, pengadaan jaring payang dan udang. (Laporan Tahunan DKP Kabupaten Trenggalek, 2007)

6.2 Saran

1. Pemerintah

Dari hasil pengoptimalisasian sumberdaya perikanan agar ditindak lanjuti dan disalurkan dalam bentuk kebijakan yang dapat membantu masyarakat pesisir/ nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan.

2. Mahasiswa

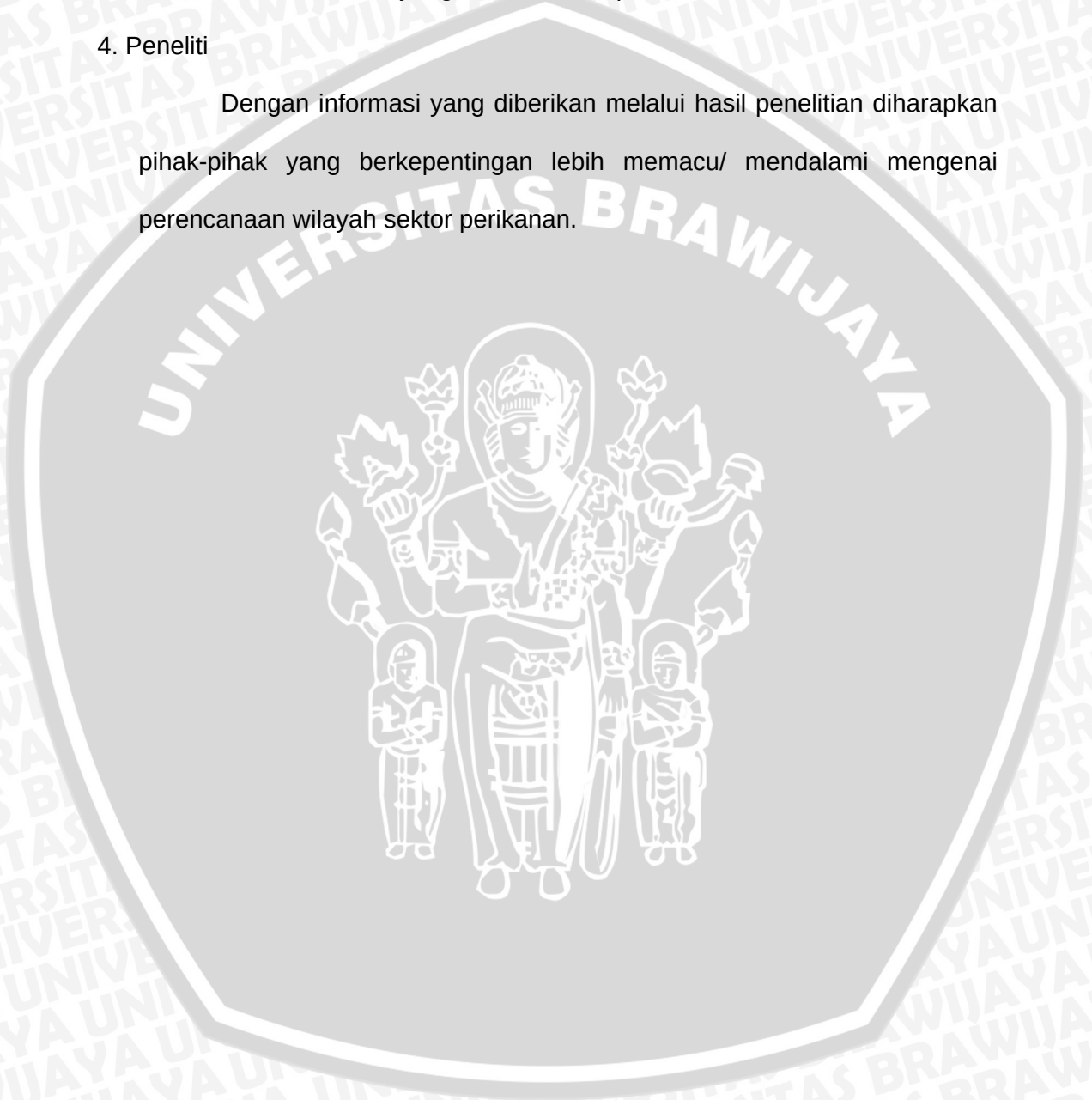
Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam pembuatan perencanaan wilayah sektor perikanan.

3. Masyarakat

Masyarakat dapat meningkatkan usaha perikanan agar mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD.

4. Peneliti

Dengan informasi yang diberikan melalui hasil penelitian diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan lebih memacu/ mendalami mengenai perencanaan wilayah sektor perikanan.

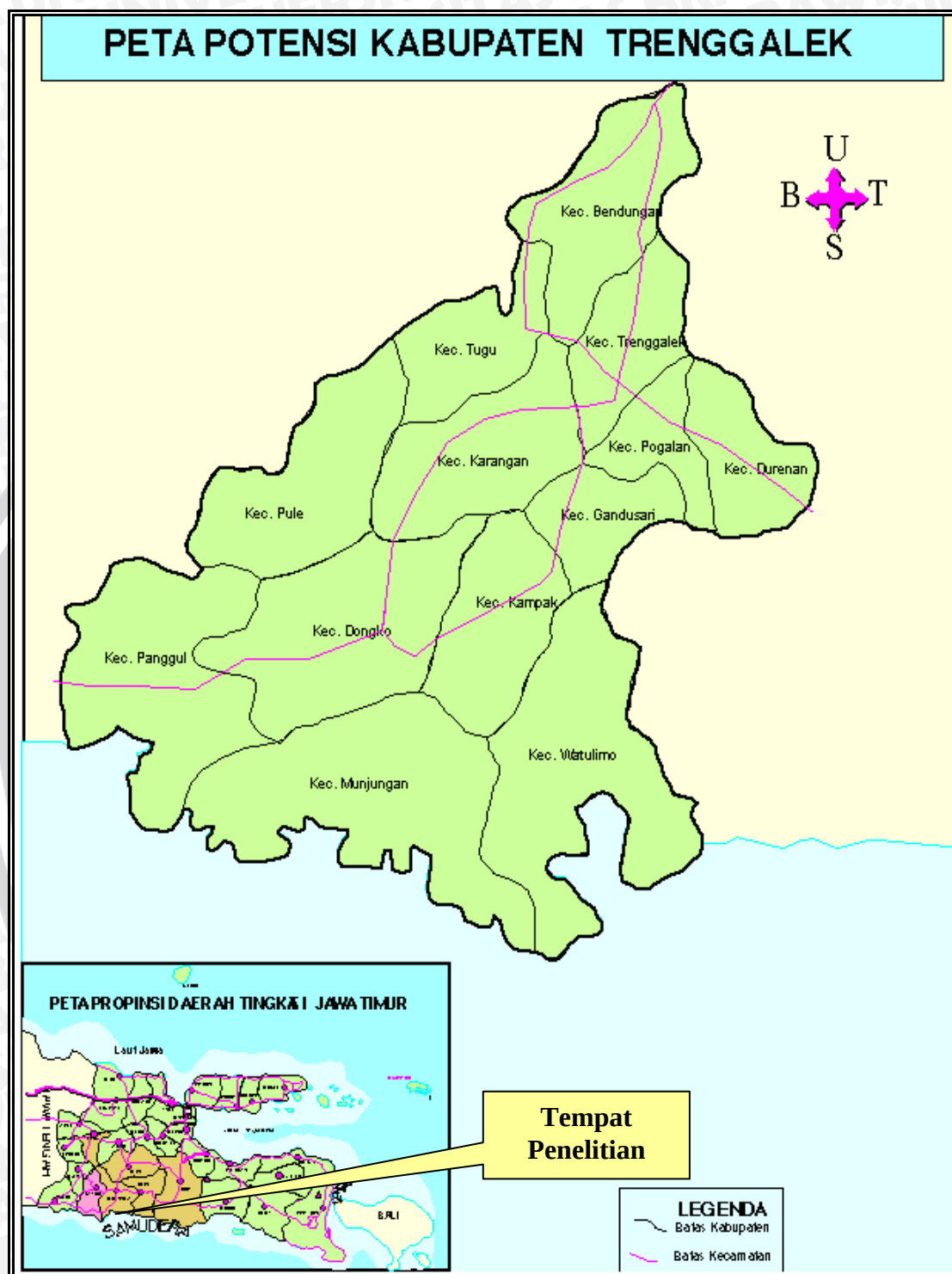


DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, zainal dan Surjatin. 2006. **Hukum dan Peraturan Perikanan**. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang
- Adisasmito, Rahardjo. 2006. **Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan**. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Ambardi dan Pribawantoro, 2002. **Pengembangan Wilayah Dan Otonomi Daerah**. CV. Cahaya Ibu. Jakarta
- Aprilia, Dewi. 2007. **Peranan Pelabuhan Perikanan Prigi Dalam mendukung Pembangunan Sektor Perikanan Di Kabupaten Trenggalek**. Skripsi Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang (tidak diterbitkan)
- Arikunto, S. 1997. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**. Rineka Cipta. Jakarta
- BPS Kabupaten Trenggalek. 2007. **Kabupaten Trenggalek Dalam Angka**. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.
- Budiharsono, Sugeng. 2001. **Teknis Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan**. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Faisal, S. 2005. **Format – Format Penelitian Sosial**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Cholik, F., S. Moeslim, E.S. Heruwati, T. Ahkmad, A. Jauzi. 2006. **60 Tahun Perikanan Indonesia**. Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN). Jakarta
- Dahuri, Rokhmin. 2002. **Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Dewi, Elita. 2002. **Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah**. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Sumatra Utara
- Dhewi, M. P. 2006. **Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur**. Skripsi Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang (tidak diterbitkan)
- Djamaluddin, Arief. 1982. **Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran**. Ghalia Indonesia. Jakarta
- DKP Kabupaten Trenggalek. 2007. **Laporan Tahunan 2006**. Dinas Kelautan dan Perikanan. Trenggalek
- Dzulfikar. 2007. **Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Jawa Timur**. Skripsi Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang (tidak diterbitkan)
- Hannesson.1988. **Ekonomi Perikanan**. Universitas Forlaget. Oslo

- Hardjamulya, Naamin. N dan Poernomo. A, 2001. **Analisis Kebijakan Pembangunan Perikanan**. Pusat Riset Perikanan Budidaya. Jakarta
- Indrayani, Erlinda. 2005. **Buku Panduan Kuliah Kebijakan Pembangunan Perikanan**. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang.
- Indriantoro, N dan Supomo, B. 1999. **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**. BPFE. Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajat. 2005. **Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi kerangka Teoritis Dan Penyusunan Hipotesis**. Erlangga. Jakarta
- Moehar, D. 2002. **Metode Penelitian Sosial ekonomi Dilengkapi Beberapa Alat Analisa Dan Penentuan Penggunaan**. Sinar Grafika Offset. Jakarta
- Nurcholis, H. 2005. **Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah**. PT Grasindo. Jakarta
- Partanto, P.A. dan Albarry, M. D. 1994. **Kamus Ilmiah Populer**. Arloka. Surabaya
- Siagian, P. 1985. **Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional**. Gunung Agung. Jakarta
- Sinar Grafika . 2004. **Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**. Sinar Grafika. Jakarta
- Singarimbun, M, dan Effendi, S. 1982. **Metode Penelitian Survei**. LP3ES. Jakarta
- Subagyo, P, M. Asri dan T.H. Handoko. 1999. **Dasar-Dasar Operation Research**. BPFE. Yogyakarta
- Suwignjo. 1985. **Administrasi Pembangunan Desa Dan Sumber-Sumber pendapatan Desa**. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Syamsul dan Hendri. 2003. **Teknik-teknik Untuk Manajemen**. Grasindo. Jakarta
- Tjahjono, A. 2005. **Perencanaan Optimal alokasi Sumberdaya Tambak Dan Implikasinya Pada Penurunan Kurva Penawaran Normatif**. Disertasi Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian Kekhususan Ekonomi Pertanian. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Malang (tidak diterbitkan)
- Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 **Tentang Pemerintahan Daerah**.
www.Indonesia.Go.id
- Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 **Tentang Pajak dan Retribusi Daerah**.
www.Indonesia.Go.id

Lampiran 1. Peta Kabupaten Trenggalek



Skala 1 : 750.000

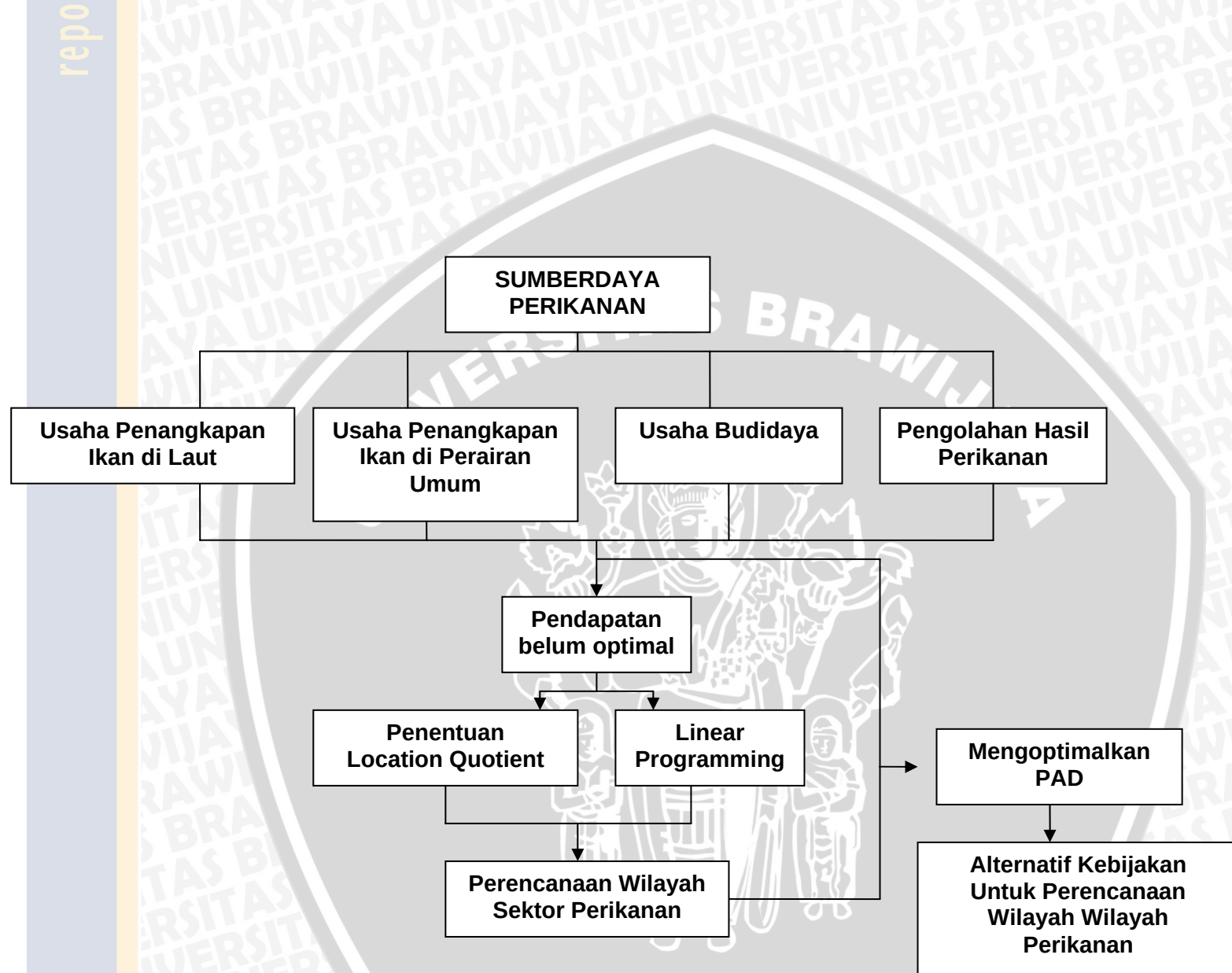
Lampiran 2. Hasil optimalisasi dengan linear programming

OPTIMALISASI SEKTOR PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PAD KABUPATEN TRENGGALEK

	penangkapan di laut	penangkapan di perairan
umum		
Maximize	9.77	15.9
Alat tangkap	9.31	0
Armada	3.1	0
tenaga kerja	1.22	72
modal	139,544.8	12,000,000
Solution	408.9151	0
	budidaya	pengolahan hasil
perikanan		
Maximize	68.84	4.52
Alat tangkap	0	0
Armada	0	0
tenaga kerja	21.39	10.18
modal	16,075,590	98,986.67
Solution	126.9682	18,329.3
		RHS
Maximize		
Alat tangkap	<=	3,807
Armada	<=	2,291
tenaga kerja	<=	189,807
modal	<=	3,912,508,000
Solution		95,584.03
	Dual	
Maximize		
Alat tangkap	0.9399	
Armada	0	
tenaga kerja	0.4076	
modal	0	
Solution		

Ranging -----

Variable	Value	Reduced Cost	Original Value	Lower Bound	Upper Bound
penangkapan di laut	408.9151	0	9.77	9.77	9.77
penangkapan di perairan umum	0	58.3286	15.9	-Infinity	74.2286
budidaya	126.9682	0	68.84	-13.0666	734.0551
pengolahan hasil perikanan	18,329.3	0	4.52	0.4239	89.5326
Constraint	Dual Value	Slack	Original Value	Lower Bound	Upper Bound
Alat tangkap	0.9399	0	3,807	-0.0002	6,880.391
Armada	0	1,023.363	2,291	1,267.637	Infinity
tenaga kerja	0.4076	0	189,807	5,628.875	397,001.1
modal	0	0	3,912,508,0*	-Infinity	Infinity



Gambar 1. Kerangka Pemikiran